MEDIA MASSA ONLINE DAN POLITIK

(Studi Tentang Jurnalis Partisan Media Online di Kota Surabaya)

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Dalam Program Studi Filsafat Politik Islam

Oleh:

AULIA RACHMAN
NIM: E74213129

PROGRAM STUDI FILSAFAT POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN AMPEL
SURABAYA
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

NAMA : Aulia Rachman

NIM : E74213129

JURUSAN : Filsafat Politk Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 4 April 2019

Saya yang menyatakan,

Aulia Rachman

E74213129

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh ***Aulia Rachman*** ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan.

Surabaya, 4 April 2019

Pembimbing,

Dr. Ainur Rofiq Al Amin, M.Ag
NIP. 197206252200501 1007

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh *Aulia Rachman* ini telah dipertahankan di hadapan
Tim Penguji Skripsi
Surabaya, 10 April 2019

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Dekan,

Dr. Kunawi, M.Ag
NIP. 196409181992031002

Tim Penguji:
Ketua,

Dr. Ainur Rofiq Al Amin, M.Ag
NIP. 197206252200501100?

Sekretaris,

M. Anas Fakhruddin, M.Si
NIP. 198202102009011007

Penguji I,

Dr. Khoirul Yahya, S.Ag, M.Si
NIP. 197202062007101003

Penguji II,

Zaky Ismail, M.Si
NIP. 198212302011011007

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: **Aulia Rachman**
NIM	: **E74213129**
Fakultas/Jurusan	: **USHULUDDIN DAN FILSAFAT**
E-mail address	: **nyomnyommen@gmail.com**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
MEDIA MASSA ONLINE DAN POLITIK

(STUDI TENTANG JURNALIS PARTISAN MEDIA ONLINE DI KOTA SURABAYA)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 - 02 - 2021

Penulis

METERAI TEMPEL
6000

(Aulia Rachman)
E74213129

ABSTRAKS

Penelitian ini berjudul Media Massa Online dan Politik (Studi Tentang Jurnalis Partisan Media Online di Kota Surabaya). Tujuan diadakannya penelitian ini untuk mengetahui motif jurnalis bergabung dengan partai politik. Serta untuk mengetahui pandangan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), Ketua Pokja jurnalis politik Kota Surabaya, dan jurnalis independen terhadap independensi jurnalis partisan dalam pemberitaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori komunikasi politik dari Laswell dan Dan Nimmo, serta teori fenomenologi Alfred Shutz.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) jurnalis yang menjadi anggota partai politik termotivasi secara rasional. Hal ini dapat dilihat dari tujuan mereka bergabung karena ada tawaran menjadi anggota legislatif. (2) Pandangan terhadap jurnalis yang merangkap fungsi menjadi anggota parpol, dianggap telah mencemari kemurnian profesi jurnalis, sebab secara otomatis ada kepentingan-kepentingan partai politik yang turut diberitakan oleh jurnalis tersebut dalam melaksanakan kerja kejurnalistikan. Hal ini dapat terlihat baik jurnalis Tri Wahyudi dan Rofik Hardian kerap memuat pemberitaan dari Partai Demokrat atau Partai NasDem. Meski bersifat objektif, namun sikap kedua jurnalis telah mencederai profesionalitas jurnalis sesuai UU No. 40 tentang Pers dan kode etik jurnalistik yang bekerja secara jujur dan bebas dari tendensi kelompok mana pun.

Kata Kunci: jurnalis partisan, komunikasi politik, media massa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**
MOTTO ..... **v**
PERSEMBAHAN ..... **vi**
ABSTRAK ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Penelitian Terdahulu 5
F. Definisi Konseptual 8
G. Kerangka Teori 13
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Penelitian 22
BAB II LANDASAN TEORI **24**
A. Komunikasi Politik 24
1. Definisi Komunikasi Politik 24
2. Komunikator Politik 27
3. Saluran Komunikasi Politik 29
4. Peran Media Massa Dalam Komunikasi Politik 31
5. Komunikator Politik sebagai Partisipan Politik 35
B. Teori Fenomenologi 41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN **44**
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 44
B. Penentuan Lokasi 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Sumber Data 45
D. Informan Penelitian 46
E. Teknik Pengumpulan Data 47
F. Teknik Analisis Data 50
G. Teknik Keabsahan Data 52
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 53
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 53
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 53
2. Profil Jurnalis Politik di Kota Surabaya 53
B. Hasil Penelitian dan Analisa 59
1. Motif Jurnalis Bergabung Partai Politik 60
2. Pandangan Terhadap Jurnalis Partisan Dalam Pemberitaan 65
BAB V PENUTUP 75
A. Kesimpulan 75
B. Saran 76
DAFTAR PUSTAKA 77
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hubungan antara media massa dan partai politik di Indonesia sudah dimulai sejak kebangkitan nasionalisme 1908, tetapi tidak seluruh surat kabar menjadi corong partai politik, sebab beberapa lainnya menjadikan dirinya sebagai organ sebuah partai politik.[38] Surat kabar *Fikiran Ra'jat* wadah Ir. Soekarno menyumbangkan tulisan-tulisannya melalui organ Partai Indonesia (Partindo), *Daulat Ra'jat* tempat Drs. Mohammat Hatta menulis dari organ Club Pendidikan Nasional Indonesia. Dalam bidang pers di era pergerakan saat ini yang paling menonjol adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada masa orde baru perkembangan pers terus berlanjut di mana media dan organisasi jurnalis dikuasai partai politik tertentu, bahkan disalahgunakan oleh penguasa negara sebagai ajang propaganda politik. Gelombang reformasi yang dimulai dari penembakan mahasiswa Trisakti 12 Mei 1998, adalah gelombang besar yang menghempaskan media massa di Indonesia mulai dari cetak hingga radio. Ketidakberdayaan radio siaran dan media-media cetak lain untuk memaparkan sebuah karya jurnalistik atas dasar kebenaran terbatas situasi politik pemerintah yang berusaha meredam "bunyi" siaran pemberitaan.[39]

Dalam pemerintahan transisi di bawah pemerintahan B.J. Habibie, reformasi diucapkan dan diharapkan mendorong demokrasi, di dalam demokrasi ada kebebasan, antara lain kebebasan jurnalistik sebagai bagian dari kebebasan berkekspresi, kebebasan mendapatkan informasi. Semua pihak yang terlibat dalam

[38]Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa, (*Obor Indonesia, 2004), 71.
[39] Adam Rainer, *Politik dan Radio,* (PT Sembrani Aksara Nusantara: Yogyakarta, 2000), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembangunan demokrasi (jurnalis, politisi, masyarakat) memasuki masa yang menarik untuk belajar.[40] Bahkan di era demokrasi seperti saat ini, pers bahkan telah menjadi pilar ke-empat di luar kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif (trias politica). Secara substansial partai politik dan pers sama-sama memiliki peluang untuk memperkuat demokrasi. Meskipun begitu, pers dan partai politik memiliki perbedaan dalam soal ideologi. Ideologi partai politik, apa pun itu, pada ujungnya tetap kekuasaan. Partai politik menginginkan kekuasaan untuk mengelola masyarakat sesuai ideologi mereka. Sehingga segala cara ditempuh untuk mencapai tujuan (kekuasaan). Sedangkan ujung profesi jurnalis ialah melayani masyarakat dengan informasi yang jujur, akurat, dan independen.[41]

Ternyata, dalam perkembangannya, peneliti menemukan fakta di lapangan, yakni terdapat dua jurnalis politik media online di Kota Surabaya yang tergabung dalam sebuah partai politik. Pertama Tri Wahyudi, dari media onlineskalanews.com yang tergabung dengan Partai Demokrat, dan Rofik Hardian dari media online mediabidik.com yang menjadi kader Partai Nasional Demokrat (NasDem). Sebenarnya, tidak ada Undang-Undang Pers yang melarang jurnalis bergabung dengan sebuah partai politik. Seperti UU Nomor 40 tahun 1999 yang mengatur: "Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini publik, harus mendapatkan perlindungan hukum, bebas dari campur tangan dan paksaan pihak manapun."Tetapi, secara etika politik, tidak boleh ada rangkap jabatan atau rangkap fungsi yang bisa mengarah pada

[40] Adam Rainer, *Politik dan Radio*, (PT Sembrani Aksara Nusantara: Yogyakarta, 2000), 14.
[41]Eko Maryadi Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), *"Pers Dalam Pusaran Politik"*, (https://www.facebook.com/notes/riskandi-nur/jurnalis-di-pusaran-politik/10151586309244561)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan absolut. Artinya apabila ada jurnalis yang bergabung dengan partai politik, apakah menjadi anggota legislatif, eksekutif, kader, hingga masuk ke struktur pengurus partai politik, otomatis dia harus meninggalkan profesi jurnalismenya demi menghindari konflik kepentingan. Hal ini mengacu pada UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, pasal 1 yang berbunyi: Jurnalis Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.[42] Juga yang tercantum pada Kode Etik Jurnalistik pasal 3 yang berbunyi: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.[43]

Jika mengacu dari temuan di atas, fenomena ini tampak menarik, mengingat keterlibatan dua jurnalis partisan yang tergabung dalam partai politik tersebut ternyata masih aktif bertugas sebagai jurnalis. Padahal dalam pemberitaan, jurnalis harus bekerja sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) di mana menjadi sosok yang indepeden, wakil publik, dan tidak berpihak pada satu pihak (*cover both side*). Terlebih situasi ini ternyata didukung oleh kondisi era digitalisasi saat ini. Ketika arus informasi begitu deras dan bisa diakses oleh masyarakat, yang seperti ini seolah mengindikasikan partai politik telah membaca perkembangan zaman dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi melalui kepanjangan tangan jurnalis media online.

---

[42] Bambang Harymurti, Wakil Ketua Dewan Pers: *Konsep Pers Profesional Menurut Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers.*
[43] Bekti Nugroho, *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas,* (Jakarta: Perpustakaan RI, 2013), 293.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebenarnya, setiap partai politik memiliki webstite pribadi. Tetapi kecenderungan konteks website sebuah partai politik yang bersifat kaku, dan penuh kepentingan politis yang terlalu mencolok, terlebih sebagai satu di antara empat organisasi yang mendapat kepercayaan paling rendah di mata masyarakat akan kesulitan menembus kelompok-kelompok publik. Sedangkan melalui media massa, dalam hal ini media online, yang bersifat umum, memiliki ruang yang sangat besar dengan ditunjang sebaran informasi yang luas ke berbagai ruang-ruang publik. Jelas perkara, pemberitaan partai politik terkait visi-misi atau pencitraan itu sendiri akan berbaur dan tersamarkan dengan informasi-informasi umum, dengan target utamanya yakni bersinggungan langsung dengan masyarakat luas. Hal ini menjadi lebih jelas bahwa kuasa profesi jurnalis lewat penggunaan media online menjadi pilihan partai politik guna membentuk opini publik. Dengan demikian, jurnalis partisan yang berafiliasi dengan partai politik telah membantu kelompok tertentu demi mencapai kepentingannya dan sekaligus melanggar marwah pers itu sendiri.

Begitulah, jika pada masa orde baru pengendalian media massa dilakukan penguasa atau partai politik untuk menguasai media tersebut untuk tujuan mengendalikan persepsi masyarakat, maka dengan adanya temuan peneliti terdapat dua jurnalis media online yang tergabung dengan partai politik, hal ini akan menjadi lebih menarik bagi peneliti untuk diteliti lebih dalam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana motif jurnalis bergabung ke dalam partai politik?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana pandangan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), Pokja Jurnalis Politik Kota Surabaya, dan jurnalis independen terhadap independensi jurnalis partisan dalam pemberitaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui motif jurnalis bergabung ke dalam partai politik.
2. Untuk mengetahui pandangan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), jurnalis independen, dan Pokja Jurnalis Politik Kota Surabaya terhadap independensi jurnalis partisan dalam pemberitaan?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Dalam manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi kepada para akademisi, baik itu mahasiswa, aktivis, atau peneliti lain yang memiliki ketertarikan lain pada masalah media dan politik.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan kesadaran akan pentingnya independensi pemberitaan jurnalis di Kota Surabaya bagi masyarakat luas.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah ada dan berhubungan dengan penelitian ini di antaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jurnal karya Tuti Widiastuti tahun 2012 berjudul ”Independensi Media Sebagai Institusi *Public Sphere:* Kasus di Indonesia”.[44] Jurnal ini membahas tentang kebebasan media di Indonesia pada era Reformasi. Sebagai Negara berkembang, media, masyarakat, dan *public sphere* (ruang publik) sama-sama memiliki peran sentral bagi pembangunan. Dalam hal ini, media merupakan wajah dari mekanisme apa yang dilihat masyarakat dari media adalah sebuah kebenaran. Tetapi, yang muncul di media di era Reformasi adalah informasi yang didominasi oleh pemilik media tersebut. Sebagai sosok penguasa, otomatis intervensi pemberitaan dalam media tersebut tidak terhindarkan. Akibatnya independensi media sebagai institusi ruang publik telah diwarnai konteks-konteks informasi yang bersifat politis. Dalam jurnalnya, penulis juga menekankan kembali independensi sebuah media dalam menjaga kaidah-kaidah dalam ruang publik. Sementara titik pembeda dengan yang dilakukan oleh peneliti lakukan, yakni terkait subjek penelitian (jurnalis).
2. Skripsi karya Khairil Anan Lubis 2011 berjudul “Kompensasi Jurnalis dan Independensi: Studi Deskriptif Tentang Peranan Kompensasi Jurnalis Terhadap Independensi Anggota Aliansi Jurnalis Indonesia Cabang Medan”. [45] Dalam skripsi ini menunjukkan bahwa jumlah kompensasi yang diterima seorang jurnalis ternyata berpengaruh dalam independensi jurnalis ketika memuat berita. Pendapatan yang mereka terima tidak cukup

[44]Tuti Widiastuti, “Independensi Media Sebagai Institusi *Public Spher*: Kasus di Indonesia” *Jurnal Ilmu Komunikasi*,Vol. 9 Nomor. 1 (Januari, 2012).
[45] Khairil Anan Lubis, “Kompensasi Jurnalis dan Independensi: Studi Deskriptif Tentang Peranan Kompensasi Jurnalis Terhadap Independensi Anggota Aliansi Jurnalis Indonesia Cabang Medan” (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan bagi jurnalis yang sudah berkeluarga, kebutuhan mereka membengkak berkali-kali lipat. Kondisi ini yang membuat, bagaimanapun, seorang jurnalis menerima pemberian dari narasumber. Respon utama dalam penelitian adalah jurnalis yang tergabung dalam komunitas AJI (Aliansi Jurnalis Indonesia). Meski mereka paham betul akan aturan larangan menerima uang atau hadiah dari narasumber, mereka terpaksa melanggar profesionalitas kinerja jurnalis demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Jurnal karya Ashadi Siregar tahun 2000 berjudul "Media Pers dan Negara: Keluar dari Hegemoni".[46] Jurnal ini berisi tentang penyalahgunaan elit-elit pemerintah dengan memanfaatkan media pers untuk menguasai rakyat. Bahwa "musuh" dari kebebasan pers dipetakan menjadi dua, pertama bersifat internal yaitu pengelola media pers. Kedua, bersifat eksternal yakni kekuasaan (negara dan modal). Namun, dalam jurnal yang berisi 26 halaman ini, hanya terfokus pada segi ekternal. Ketika media pers dituntut kredibilitasnya dengan menyediakan informasi yang faktual, ternyata negara dengan akses kontrol penguasa terlibat mampu mengintervensi pemberitaan. Padahal, kebebasan pers dapat dilihat sebagai norma kultural yang menjamin salah satu dimensi hak asasi manusia, yaitu hak manusia untuk membentuk pendapatnya secara bebas, terbentur oleh pemilik kekuasaan. Dengan kecenderungan sikap kepemimpinan seperti ini, bisa dijelaskan kebebasan pers yang terkungkung berdampak pada masyarakat

[46]Ashadi Siregar, "Media Pers dan Negara: Keluar dari Hegemoni" *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik,* Vol.4 Nomor. 2 (Nopember, 2000).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang "lumpuh" akan akses informasi yang mencerahkan. Bahkan institusi politik masyarakat (partai politik) kehilangan fungsi dalam konteks kehidupan warga. Jika dalam penelitian terdahulu ini mengacu pada media pers dan negara, maka penelitian yang sedang diteliti saat ini merujuk pada media massa dan partai politik.

Sementara dalam penelitian ini membahas motif jurnalis partisan di Kota Surabaya yang bergabung dengan partai politik. Serta mengulas tentang pandangan PWI, jurnalis independen, dan Pokja Wartawan Politik terkait keterlibatan jurnalis partisan dalam independensi pemberitaan.

F. Definisi Konseptual

Konsep merupakan unsur pokok dalam penelitian. Sehubungan dengan penelitian ini perlulah untuk membatasi dari sejumlah konsep yang diajukan dalam skripsi ini.

1. Media Massa

Media massa adalah komunikasi dengan menggunakan sarana atau peralatan yang dapat menjangkau massa sebanyak-banyaknya dan area yang seluas-luasnya.[47] Secara bahasa, kata Media berasal dari bahasa Latin "Medius" yang berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab media diartikan perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan.[48] Media massa terbagi menjadi dua, yakni media massa cetak dan media massa elektronik. Media

[47]Dennis McQuail, *Teori Komunikasi Massa*, (Erlangga: Jakarta, 2005), 3.
[48]Pengertian Media Massa Menurut Para Ahli, http://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-media-massa-menurut-para-ahli.html?m=1. (21 Februari 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

massa elektronik adalah sarana komunikasi dengan alat elektronik seperti televisi, radio, hingga internet. Sementara media massa cetak adalah sarana komunikasi melalui medium tulisan, semisal surat kabar, majalah, atau tabloid. Media massa elektronik ternyata memiliki kemampuan khusus dibanding media cetak. Hal ini didukung oleh perkembangan sumber daya teknologi saat ini. Salah satu kelebihan dari media massa elektronik yaitu sifatnya yang tidak terbatas waktu. Misalkan, apabila terjadi peristiwa di suatu wilayah, masyarakat dapat menyaksikan secara langsung maupun mendapat kabar informasi tersebut lebih cepat, baik melalui televisi atau berita di internet. Jadi, secara umum, dapat disimpulkan bahwa media massa merupakan sarana dan saluran resmi alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat.[49]

2. Jurnalis

Jurnalis adalah orang yang melakukan pekerjaan kejurnalisan dan tugas-tugas jurnalistik secara rutin, dan dalam definisi lain, jurnalis dapat dikatakan sebagai orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat di media massa, baik media cetak atau media elektronik serta media online. Dalam Undang – Undang Pers No.40 Tahun1990, Bab I Pasal I dinyatakan bahwa jurnalis adalah orang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.[50]

[49]Tim Penyusun Kamus Pusat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).
[50]Syarifudin Yunus, *Jurnalistik Terapan*,(Ciawi – Bogor: Ghalia Indonesia, 2010),38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dunia jurnalis adalah profesi yang tugas intinya melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam hal layanan informasi publik. Para Jurnalis berkewajiban menyampaikan kebijakan, kondisi, hal – hal, dan lain-lainnya yang perlu diketahui publik. Dalam tugasnya, jurnalis mendapatkan hak-hak istimewa yang meliputi: perlindungan dari undang-undang tentang kebebasan berpendapat, berhak memakai bahan-bahan, aneka dokumen dan pernyataan-pernyataan publik, diperbolehkan menyentuh ranah pribadi seseorang atau publik figure dalam mencari informasi yang akurat sebagai tindakan perwakilan mata dan telinga publik,sepanjang tidak melanggar kode etik.[51]

3. Politik

Politik menurut Ramlan Surbakti adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.[52] Pemikiran mengenai politik (*politics*) di dunia Barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani kuno abad ke-5 S.M. Sebagaimana Plato menyebut politik sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (*polity)* yang terbaik.[53] Hal senada juga diutarakan Miriam Budiardjo, bahwasannya politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk

[51] Sumber: http://www.anneahira.com/*pelanggaran-kode-etik-jurnalistik*.html.
[52]Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 14.
[53]Miriam Budiardjo,*Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. [54] Akan tetapi, dalam realita sehari-hari, kegiatan politik dalam pelaksanaanya, selain bertujuan membawa proses bermasyarakat menjadi lebih baik, juga kerap memantik hal-hal negatif. Hal ini tidak dapat disangkal, mengingat kegiatan tidak terpuji tersebut, seperti yang dimaksudkan oleh Peter Merkl, ditengarai karena: "Politik, dalam bentuk yang paling buruk adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri.[55]

4. Jurnalis Politik

Setiap jurnalis memiliki Kelompok Kerja (Pokja) masing-masing yang ditentukan oleh pimpinan redaktur perusahaan media. Mulai dari bidang ekonomi, politik, sosial, hukum, kriminal, pendidikan, hingga perusahaan-perusahaan baik milik swasta atau pemerintah yang relevan menjadi sumber informasi.

Jadi, jurnalis politik adalah seorang jurnalis yang aktif dan terdaftar dalam sebuah media massa dan di tempatkan pada pos politik yang mengemban tugas untuk mencari berita-berita tentang politik yang faktual dan objektif. Dalam hal ini, jurnalis politik di Kota Surabaya memiliki dua sumber berita terkait isu-isu politik. Pertama, di Dewan Pemerintahan Kota Surabaya, atau biasa disebut jurnalis kota, dan kedua di Dewan Provinsi Jawa Timur, atau jurnalis provinsi.

[54]Ibid, 15.
[55]Ibid, 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Jurnalisme Partisan

Jurnalisme partisan, dalam jurnal Abdul Halik ialah kategori ketika jurnalisme dengan segala praktiknya diarahkan pada pemenuhan kepentingan pragmatisme kekuasaan. Tindakan seperti ini cenderung mendorong bangkitnya sentimen publik pada kekuatan politik tertentu daripada penguatan nalar publik akan pentingnya diskursus untuk mencapai konsensus.[56] Dalam konteks profesi jurnalistik, setiap jurnalis dituntut memenuhi kebutuhan informasi publik akan berbagai berita serta tunduk pada kode etik jurnalistik.

Saur Hutabarat menjelaskan bahwa jurnalisme partisan lahir setelah kebebasan berpartai politik dan kebebasan pers di era reformasi Indonesia dibuka. Artinya, partai politik bebas menerbitkan media atau pers. Hak dasar jurnalisme partisan adalah setiap golongan, partai, suku apa saja, memiliki hak berkomunikasi. Namun pers partai tidak bertahan lama lantaran sebab pembacanya hanya terbatas pada anggotanya sendiri. Semangat partisan itu bisa bersumber karena ada kepentingan ekonomi atau kepentingan politik.[57] Namun, bagi jurnalisme yang berafiliasi kepentingan politik, seperti pemilik media

[56] Abdul Halik, "Jurnalisme Partisan dalam Pusaran Kepentingan Ekonomi Politik Media" *Jurnal Komunikasi UIN Aluiddin Makassar* , Vol 04 Nomor 2 (November. 2018)
[57] Saur Hutabarat, Kepala Litbang harian Media Indonesia, sumber: https://kippas.wordpress.com/2008/01/23/pers-partisan/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau jurnalisnya sendiri condong kepada partai politik tertentu, hal itu yang perlu lebih diperhatikan.

G. Kerangka Teori

Setiap penelitian memerlukan kejelasan titik tolak atau landasan berpikir untuk memecahkan masalah atau menyoroti masalah itu sendiri. Dalam hal ini, teori juga berfungsi untuk memberi bantuan peneliti untuk menganalisis pokok permasalahan. Dalam penelitian ini teori yang dianggap relevan adalah sebagai berikut:

1. Teori Komunikasi Politik

Pada proses politik, komunikasi politik berada di posisi penting sebagai jembatan penyampai pesan. Dalam kehidupan bernegara, setiap individu memerlukan informasi yang disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Dalam hal ini Rush dan Althoff mendefinisikan komunikasi politik sebagai: proses di mana informasi politik yang relevan diteruskan dari suatu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik.[58]Oleh karena itu Miriam Budiardjo menyebut sistem politik demokrasi selalu mengisyaratkan adanya kebebasan pers (*freedom of press*) dan kebebasan berbicara (*freedom of speech*). Fungsi-fungsi semua ini secara timbal balik dimainkan oleh komunikasi politik.[59]

[58] Rush dan Althoff, 1997, *Pengantar Sosial Politik*, (Jakarta: Raja Grafindo), 24.
[59] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia 1956), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan Nimmo menjelaskan bahwa terdapat tiga kelompok yang dapat berperan sebagai komunikator politik: politikus, profesional, dan aktivis. Lebih lanjut, Dan Nimmo turut menjelaskan tiga jenis media komunikasi yang digunakan dalam komunikasi politik. Ketiga media tersebut, yakni media massa, media komunikasi inter personal, dan media komunikasi organisasi.[60] Terdapat dua bentuk saluran komunikasi massa, masing-masing sesuai tingkat langsungnya komunikasi satu kepada banyak. Bentuk pertama terdiri atas komunikasi tatap muka seperti seorang kandidat politik bicara di depan rapat umum atau konferensi pers. Bentuk kedua terdiri jika terdapat perantara ditempatkan antara komunikator dan khalayak. Dalam hal ini, media, teknologi hingga sarana komunikasi lainnya turut serta. Batasan media massa yang dijelaskan bersifat longgar yang tidak hanya berhenti pada media elektronik dan cetak, namun juga media-media komunikasi lain yang berbentuk rapat-rapat besar dan pertemuan-pertemuan.[61]

2. Teori Fenomenologi

Alfred Schutz menjelaskan bahwa tugas fenomenologi yakni menghubungkan pengetahuan ilmiah dengan pengalaman sehari-hari, dan dari kegiatan di mana pengetahuan dan pengalaman itu berasal. Dengan kata lain mendasarkan tindakan sosial pada pengalaman,

[60] Dan Nimmo, *Komunikasi Politik Komunikator Pesan Media*, terj. Jalaluddin Rakhmat (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), 75.
[61]Ibid, 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makna, dan kesadaran.[62] Schutz adalah orang pertama mencoba menjelaskan bagaimana fenomenologi dapat diterapkan guna mengembangkan wawasan ke dunia sosial. Schutz juga memusatkan perhatian pada cara orang memahami kesadaran orang lain, akan tetapi ia hidup dalam aliran kesadaran diri sendiri. Perspektif yang dipakai Schutz untuk memahami kesadaran itu dengan konsep intersubjektif. [63]

Alfred Schutz sering dijadikan pusat penerapan metodelogi penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Pertama, karena melalui Schutz pemikiran dan ide Husserl yang dirasa abstrak dapat dijelaskan lebih gamblang dan mudah dipahami. Kedua, Schutz merupakan orang pertama yang menerapkan fenomenologi dalam penelitian ilmu sosial.[64]

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Perlu ditegaskan di sini bahwa penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dihadapi berupa pernyataan verbal, dan sikap pemaknaan bukan numerik atau angka-angka.[65]Oleh karena itu data dalam penelitian kualitatif adalah

[62]Engkus Kuswarno, *TeoriFenomenologi*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2013), 17.
[63]Ibid, 22.
[64]Henry J.Schamandt, *Filsafat Politik: Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 191.
[65] Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarsin, 1996), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

obyek yang alamiah maka penelitian ini juga sering disebut sebagai metode naturalistik.[66]

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*).Penelitian ini berfokus pada jurnalispartisan yang tergabung dalam partai politik di Kota Surabaya.

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di *pers room* Kantor DPRD Kota Surabaya. Dalam memilih lokasi penelitian ini, peneliti memiliki alasan, pertama karena di Kantor DPRD Kota Surabaya merupakan pos bagi jurnalis politik di Surabaya. Kedua, tempat ini mudah dijangkau oleh peneliti dan lokasi tersebut juga titik kumpul bagi seluruh jurnalis-jurnalis politik dari berbagai media massa.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek yang memberikan data sesuai dengan klasifikasi data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama dan kebutuhan mendasar dari penelitian ini. Sumber data diperoleh informan saat terjun langsung ke lapangan tempat penelitian. Beberapa informan akan dipilih berdasarkan kebutuhan penelitian, serta berkaitan dengan tema penelitian.

[66] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2009), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang berlangsung. Informan bukan hanya sebagai sumber data, melainkan juga sebagai aktor yang menentukan berhasil atau tidaknya penelitian berdasarkan hasil informasi yang diberikan. Sehingga antara peneliti dan informan memiliki peran dan fungsi yang kurang lebih sama, yaitu memberikan tanggapan atau jawaban atas rumusan masalah yang telah diuraikan.

Teknik yang digunakan untuk memilih informan menggunakan *Purpossive Sampling,* artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu, alih-alih diacak. Artinya menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian.[67] Adapun kriteria informan yang ditunjuk atau dipilih dalam penelitian ini yaitu:

1. Jurnalis yang telah lama berkecimpung dan memahami seluk-beluk dengan suatu kerja kewartawanan yang menjadi perhatian penelitian, sebab biasanya memiliki kemampuan memberikan informasi yang akurat terkait permasalahan yang diteliti.
2. Jurnalis politik media online di Pokja Kota Surabaya yang berafiliasi dengan sebuah partai politik
3. Jurnalis yang masih terikat secara penuh serta aktif pada perusahaan media massa maupun organisasi wartawan.

[67] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Fajar Interpratama, 2007), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Jurnalis yang mempunyai kesamaan saluran media online dan pos pemberitaan untuk dimintai informasi.

Adapun informan pada penelitian ini sesuai kriteria adalah:

1. Tri Wahyudi, jurnalis politik dari media online skalanews.com, tergabung dalam pengurusan Partai Demokrat.
2. Rofik Hardian, jurnalis politik dari media online mediabidik.com, tergabung dan menjadi kader Partai Nasional Demokrat (NasDem).
3. Maulana, ketua Kelompok Kerja (POKJA) jurnalis politik di DPRD Kota Surabaya.
4. Didai Rosadi, jurnalis politik independen dari bangsaonline.com, di DPRD Kota Surabaya.
5. Abdurrahman Ubaidah, Pengurus Persatuan Jurnalis Indonesia (PWI) Jawa Timur.

2. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data penunjang sumber utama dalam melengkapi sumber data primer. Data sekunder sering juga disebut sumber data tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain. Sehingga sumber data bersifat penunjang dan melengkapi data primer. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah literatur dan dokumentasi.

Sumber literatur adalah referensi yang digunakan untuk memperoleh data teoritis dengan cara mempelajari dan membaca literatur yang ada hubungannya dengan kajian pustaka dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan baik yang berasal dari buku maupun internet. Sedangkan untuk dokumentasi sebagai tambahan, bisa berupa foto, rekaman, yang didapat peneliti dari informan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian serta sumber data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu:

a. Observasi, adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala yang diteliti yang dilaksanakan dalam situasi khusus. Observasi dalam penelitian ini adalah peneliti dengan saksama mengamati secara langsung terhadap obyek dan sasaran penelitian. Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.[68] Data yang diperoleh saat observasi ialah informan yang bisa menjawab pertanyaan yang peneliti butuhkan.

b. Wawancara, teknik wawancara dalam penelitian pendekatan kualitatif dibagi menjadi tiga kategori, yaitu wawancara dengan cara melakukan pembicaraan informal, wawancara umum yang terarah, wawancara terbuka dan standar.[69] Peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan narasumber untuk memeroleh keterangan atau informasi yang terkait dengan tema yang diambil.

[68]Jonanthan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), 224.
[69]Ibid, 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sesi wawancara ini data yang ditemukan ialah seputar awal, motif, serta target khusus jurnalis terkait bergabung dengan partai politik.

c. Dokumentasi, dalam penelitian ini berupa bukti catatan tertulis dan rekaman suara hasil wawancara dengan narasumber, hingga disertakan foto setiap narasumber.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah usaha yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[70]

Analisis data pada tahapan ini adalahsuatu proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola atau kategori dan uraian satuan dasar sehingga lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data bertujuan untuk menelaah data secara sistematika yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data yang antara lain: observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul selanjutnya adalah data diklasifikasikan sesuai dengan kerangka penelitian kualitatif deskriptif yang berupaya

[70]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggambarkan kondisi latar belakang penelitian secara menyeluruh dan data tersebut ditarik suatu temuan penelitian.[71]

Teknis analisis data yang dilakukan yaitu menggunakan model interaktif analisis yang terdiri dari tiga komponen analisa utama yang membentuk suatu tahapan.Adapun tiga komponen analisis utama adalah:[72]

a. Reduksi data, merupakan proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan, dan abstraksi data yang dilakukan secara terus menurus selama penelitian. Dalam reduksi data peneliti memusatkan tema dan membuat batas-batas permasalahan. Proses ini terus berjalan sampai penelitian selesai.
b. Penyajian data, merupakan suatu rangkaian infomasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Dengan melihat penyajian data, peneliti akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisa atau tindakan lain berdasarkan penelitian tersebut.
c. Penarikan kesimpulan, merupakan tahap pengambilan keputusan, dimana peneliti dapat menarik kesimpulan terakhir berdasarkan data yang didapat.

[71]Ibid, 103.
[72]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alvabeta, 2015), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Keabsahan Data

Data yang diperoleh dari lapangan untuk menjamin keabsahan dalam data penelitian kualitatif, terdapat beberapa ukuran atau kriteria utama untuk menjamin kebenaran data yang diperoleh.

Teknik keabsahan data yang digunakan peneliti adalah dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.[73]

6. Triangulasi

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber yang dicapai dengan cara membandingkan data hasil wawancara informan diatas dengan data yang sudah ada sebelumnya.[74]Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber(informan), hingga data tersebut bisa dinyatakan benar (valid) dan juga melakukan observasi serta dokumentasi di berbagai sumber.

I. Sistematika Penelitian

Penelitian ini dibagi dalam lima bab:

BAB I: PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

[73]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 178.
[74]Sugiyono, *Memahami Peneliian Kualitatif*, 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II: KERANGKA TEORI

Penulis akan mengeksplorasi kerangka teori mengenai komunikasi politik dan fenomenologi yang digunakan sebagai landasan konseptual guna menjawab pertanyaan penelitian yang diangkat penulis.

BAB III: SETTING PENELITIAN

Deskripsi umum lokasi penelitian, profil jurnalis politik di Surabaya, serta kondisi objek penelitian di pers room DPRD Kota di Kota Surabaya.

BAB IV: PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Memaparkan hasil penelitian dan membahas tentang motif jurnalis di Kota Surabaya yang bergabung dengan partai politik. Serta memaparkan pandangan PWI, jurnalis independen, dan Pokja Wartawan politik Kota Surabaya terhadap independensi jurnalis partisan dalam pemberitaan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi analisa data memaknai hasil penelitian "Media Massa Online dan Politik (Studi Tentang Jurnalis Partisan Media Online di Kota Surabaya)".

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Komunikasi Politik

1. Definisi Komunikasi Politik

Meski komunikasi dan politik memiliki wilayah keilmuannya masing-masing, tapi keduanya memiliki kesamaan dalam objek penelitian: manusia. Hakikat komunikasi adalah proses pernyataan antara manusia yang dinyatakan itu adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya.[75] Sebagai makhluk sosial, setiap individu perlu berkomunikasi satu sama lain agar dapat berkembang di lingkungan sosial. Komunikasi bisa dikatakan efektif apabila antara penyampai pesan dan penerima pesan sama-sama menerima. Sementara politik menurut Laswell adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana caranya *(who gets what, when, how).* Selain itu politik juga dipahami sebagai pembagian nilai-nilai oleh orang-orang yang berwenang, kekuasaan, dan pemegang kekuasaan. [76] Sedangkan Ramlan Surbakti menjelaskan politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan

[75]Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 28.
[76]Ardial, *Komunikasi Politik*, (Jakarta Barat: PT. Indeks, 2010), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam wilayah tertentu.[120]

Dari penjelasan singkat kedua definisi di atas, kemudian dihubungkan dalam komunikasi politik, maka terdapat suatu rumusan: komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini, dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik.[121] Mengenai komunikasi politik ini, Kantaprawira memfokuskan pada kegunaannya, yakni untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup di masyarakat, baik pikiran intra golongan, institusi, asosiasi, atau pun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah. [122]

Jika ditinjau dari tujuan politik, hakikat komunikasi politik adalah upaya kelompok manusia yang mempunyai orientasi pemikiran politik atau ideologi tertentu demi menguasai dan memperoleh kekuasaan, dengan kekuatan sebagaimana tujuan pemikiran dan ideologi politik tersebut dapat diwujudkan. Pada titik ini, Lasswell menjelaskan orientasi komunikasi politik dengan dua hal yang sangat jelas. Pertama, bahwa komunikasi politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan; nilai-nilai dan tujuan itu sendiri dibentuk dalam proses perilaku yang sesungguhnya merupakan suatu

[120]Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 14.
[121]S. Soesanto Astrid, *Komunikasi Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Bina Cipta, 1980), 2.
[122]Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik di Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian. Kedua, bahwa komunikasi politik bertujuan menjangkau masa depan dan bersifat mengantisipasi serta berhubungan dengan masa lampau dan senantiasa memerhatikan kejadian masa lalu.

Dalam penelitian komunikasi, Lasswell telah melahirkan model penelitian yang dikenal dengan model Lasswell. Model Laswell menunjukkan pada model analisis, yaitu analisis sumber (siapa), analisis isi (berkata apa), analisis khalayak (kepada siapa), dan efek politik (bagaimana efeknya). Dalam kaitan dengan kajian penelitian komunikasi politik, model Laswell banyak dipakai dalam rangka paradigma atau perspektif mekanistis, sebagaimana dilakukan oleh Dan Nimmo.[123]

Pada ruang lingkup tersebut, Nimmo memasukkan hubungan pers dengan pemerintah sebagai hubungan antara jurnalis dengan pejabat pemerintah, keduanya digolongkan sebagai komunikator politik. Rivers (1980), menegaskan hubungan media massa dengan pemerintah sebagai bagian penting dari studi komunikasi politik. Mereka menyebut empat bidang penelitian komunikasi yang penting. Pertama, pengaruh pemerintah terhadap media. Yaitu studi tentang peraturan, hukum, pengendalian ekonomi, aturan pengumpulan berita, dan penyensoran. Kedua, sistem informasi pemerintahan yang meliputi saluran informasi formal maupun informal mengenai personel pemerintahan. Ketiga, dampak media terhadap pemerintah

[123]Ardial.*Komunikasi Politik*...,28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai penggunaan media oleh pejabat, dan dampak pemberitaan pada perilaku pejabat. Keempat, terpusat pada media, kelembagaan, isi berita dan aspek-aspek lain yang dipelajari melalui analisis isi. [124]

Dalam seluruh proses komunikasi politik media massa, baik cetak maupun elektronik, memainkan peranan penting di samping bentuk-bentuk-bentuk komunikasi lain seperti bertatap muka, surat-menyurat, media tradisional, keluarga, organisasi, dan pergaulan. [125]

2. Komunikator Politik

Salah satu ciri komunikasi adalah bahwa orang jarang dapat menghindari dari keturutsertaan. Hanya dihadiri dan diperhitungkan oleh seorang lain pun memiliki nilai pesan. Dalam arti paling umum, karena itu, kita semua adalah komunikator politik. [126] Komunikator politik dapat diidentifikasi dalam tiga kategori:

a. Politikus sebagai komunikator politik

Politikus sebagai komunikator politik adalah orang yang bercita-cita untuk dan atau memegang jabatan pemerintahan yang harus berkomunikasi tentang politik. Dalam kewenangannya politikus berkomunikasi sebagai wakil suatu kelompok atau langganan; pesan-pesan politikus itu mengajukan dan melindungi tujuan kepentingan politik. Artinya komunikator politik mewakili kepentingan

[124]Ardial.*Komunikasi Politik*...,29.
[125]Alfian, *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1990), 2.
[126]Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*,peny.Jalaluddin Rahkmat(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok.[127] Sebagai komunikator politik yang berkecenderungan terhadap ideolog, politikus lebih menyibukkan dirinya untuk menetapkan tujuan kebijakan yang lebih luas, mengusahakan informasi, bahkan mendukung perubahan revolusioner.

b. Profesional sebagai komunikator politik

Seorang komunikator profesional, menurut James Carey, adalah seorang makelar simbol yang menerjemahkan sikap, pengetahuan, dan minat suatu komunitas bahasa ke dalam istilah komunitas bahasa lain yang berbeda tetapi tetap dapat dimengerti. [128]

Maka komunikator profesional bisa disebut manipulator yang menghubungkan para pemimpin satu sama lain dengan para pengikut. Para profesional ini menjual keahliannya dalam memanipulasi, menjualkan, menghubungkan, dan menginterpretasikan kepada para politikus dengan yang lain. Komunikator profesional dari unsur profesional adalah jurnalis dan promotor. Sebagai komunikator profesional, jurnalis secara khas adalah karyawan organisasi berita yang menghubungkan sumber berita dengan khalayak. Jurnalis di sini baik berasal dari media massa cetak (koran, majalah, tabloid) maupun elektronik (televisi, radio, internet).

c. Aktivis sebagai komunikator politik

Terdapat dua komunikator politik dalam kalangan aktivis. Pertama yakni juru bicara bagi kepentingan terorganisasi.

[127]Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media....,* 31.
[128]Ibid..,33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komunikator di kalangan ini tidak menjadikan komunikasi politik sebagai lapangan pekerjaan. Tetapi komunikator lebih berbicara untuk kepentingan organisasi, juga mewakili keanggotaan suatu organisasi serta melakukan tawar-menawar politik. Aktivis sebagai komunikator politik berikutnya adalah pemuka pendapat. Komunikator ini berperan sebagai memengaruhi keputusan orang lain dengan meyakinkan komunikan politik untuk mengikuti pilihannya, atau sering dikatakan memberi petunjuk pada komunikan guna membuat keputusan yang sama dengannya. Peran lain pemuka pendapat sebagai komunikator politik adalah meneruskan informasi politik dari media berita kepada masyarakat umum. [129]

3. Saluran Komunikasi Politik

Komunikator politik, apakah dia politikus, profesional, atau aktivis, menggunakan pembicaraan persuasif, baik untuk saling memengaruhi maupun memengaruhi anggota khalayak yang kurang terlibat di dalam politik. Sementara saluran dalam komunikasi ialah alat atau upaya yang digunakan untuk mengirim pesan yang berupa: siapa mengatakan apa kepada siapa.[130] Dan Nimmo menjelaskan terdapat tiga tipe utama saluran komunikasi politik: saluran komunikasi massa, interpersonal, dan organisasi.

a. Saluran komunikasi massa adalah satu tipe utama yang menekankan komunikasi satu kepada banyak. Ada dua bentuk saluran

[129]Ibid,..,37.
[130]Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komunikasi massa, masing-masing berdasarkan tingkat langsungnya komunikasi satu kepada banyak. Bentuk pertama yaitu komunikasi tatap muka. Seperti seorang kandidat politik berbicara di rapat umum atau seorang presiden muncul di depan banyak jurnalis dalam konferensi pers. Bentuk kedua terjadi jika ada perantara ditempatkan di antara komunikator dan khalayak. Di sini, media, teknologi, sarana, dan alat komunikasi lainnya turut serta. Contoh komunikasi dengan perantara adalah pidato kepresidenan ke seluruh negara (satu kepada banyak) melalui televisi.

b. Saluran komunikasi interpersonal merupakan bentuk daru hubungan satu kepada satu. Saluran ini pun bisa berbentuk tatap muka atau berperantara. Contoh saluran interpersonal berperantara seperti seorang kandidat kepresidenan berjalan melalui orang banyak sambil berjabat tangan. Lalu seorang kandidat lokal yang mengunjungi dari rumah ke rumah di daerah pinggiran merupakan contoh saluran interpersonal tatap muka.

c. Saluran komunikasi organisasi yakni saluran yang menggunakan perangkat manusia sebagai saluran komunikasi politik. Komunikasi organisasi menggabungkan penyampaian satu-kepada-satu, dan satu-kepada-banyak. Seorang presiden, misalnya, melakukan diskusi tatap muka dengan anggota-anggota stafnya dan kepala nasihatnya. Akan tetapi, kebanyakan organisasi politik begitu besar sehingga komunikasi satu-kepada-satu dengan seluruh anggotanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mustahil bisa dilaksanakan. Oleh sebab itu, ada sarana untuk komunikasi satu-kepada-banyak yang berperantara di dalam organisasi: pengedaran memorandum, sidang, buletin, dan laporan berkala intern, dan lokakarya.

Apa pun salurannya, atau teknologinya (lisan, cetak, atau elektronik), makna mengalir bukan dari saluran, melainkan tercipta dalam pikiran penerima. Maka, dalam pengertian ini, semua saluran komunikasi adalah saluran politik karena sifatnya sendiri.[131]

4. Peran Media Massa dalam Komunikasi Politik

Media massa baik berupa pers, televisi, radio, internet, merupakan suatu institusi penting dalam masyararakat. Media massa adalah sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya. Asumsi lain diartikan media massa merupakan industri tersendiri yang memiliki peraturan dan norma-norma yang menghubungkan institusi tersebut dengan masyarakat dan instutusi sosial lainnya.[132] Peran media massa dapat dirumuskan secara singkat antara lain:

a. Media massa memberi informasi dan membantu kita mengetahui secara jelas segala ikhwal tentang dunia sekelilingnya kemudian menyimpannya ke dalam ingatan kita. Media massa juga berfungsi sebagai pengawas bagi kita untuk mengajukan perbandingan

[131]Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 191.
[132]Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hal 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari apa yang kita lihat atau dengar dengan dunia yang berada di luar lingkungan hidup kita. Media massa sejak awal sebenarnya melakukan tugas mengumpulkan kemudian membagi informasi yang diinginkan masyarakat pada umumnya.

b. Media massa membantu menyusun agenda atau menyusun jadwal kehidupan setiap hari. Ketika membaca surat kabar, mendengar radio, atau menonton televisi, kita bisa mengetahui harga beras, bahan bakar motor akan naik. Berdasarkan informasi tersebut kita dapat menyusun dan mengambil keputusan mendahuluinya.

c. Media massa berfungsi membantu berhubungan dengan berbagai kelompok masyarakat lain di luar masyarakat kita. Melalui informasi dari koran, radio, atau internet, kita seakan diantar lebih dini untuk mengenal atau memahami ciri atau cara khas suatu daerah yang berada di luar pulau hingga peristiwa bencana alam yang terjadi di luar negeri. Media massa telah mengantar kita untuk lebih dekat dengan suasana atau konteks kehidupan, dan mungkin kebudayaan suatu masyarakat.

d. Media massa membantu mensosialisasikan pribadi manusia. Lewat media massa kita melengkapi apa yang hendak dipelajari tentang para pendahulu. Nilai-nilai apa yang baik harus diwarisi, dan nilai-nilai yang patut ditolak. Media mengajarkan berbagai sistem nilai baru yang harus dianuti atau ditolak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Media digunakan menarik khalayak yang mencari keuntungan dari pesan yang diterimanya. Melalui media banyak orang menikmati keuntungan, selain pemilik media tetapi juga khalayak. Misalnya pemilik usaha memasang iklan dan pemilik media memperoleh keuntungan. Karena media memperkenalkan ide dan produk secara langsung dan menarik, maka diciptakan daya tarik dengan teknik tertentu.

f. Media massa sebagai media hiburan, sebagai besar media melakukan fungsi sebagai pemberi hiburan bagi khalayak. Misalnya melalui surat kabar, majalah, dan televisi, tidak saja informasi serius yang diperoleh, karena diselingi informasi hiburan yang ringan.

Jadi, melalui fungsi-fungsi media massa yang telah dijelaskan, media massa memilikiperan dalam komunikasi politik, yakni penyampai berita atau pesan politik kepada masyarakat. Sedangkan pengertian berita politik sendiri adalah kreasi gabungan antara jurnalis yang merakit serta melaporkan berita dan komunikator politik lain — politikus, dan juru bicara— yang mempromosikannya. [133]

Namun, persoalan yang perlu ditinjau lebih spesifik sekarang adalah hubungan perangkat komunikator politik antara politikus dengan jurnalis. Tujuan politikus dalam komunikasi politik ialah memperoleh dukungan massa atau pendapat umum. Begitu juga dengan jurnalis yang membutuhkan berita politik atau politikus untuk

[133]Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi objek pemberitaan atau narasumber berita. Tugas politikus dalam mengambil keputusan politik melalui komentar atau perilakunya, tentu menjadi objek pemberitaan yang menarik bagi seorang jurnalis, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Itulah yang menyebabkan politikus dan media massa memiliki saling ketergantungan dan saling membutuhkan. [134]

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa jurnalis dalam kelompok komunikator politik, menurut Dan Nimmo ialah kelompok profesional.Sebagai profesional dalam komunikasi politik, jurnalis dengan sendirinya bekerja berdasarkan prinsip dan kode etik jurnalistik. Seperti yang tercantum pada UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, pasal 1 yang berbunyi: Jurnalis Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.[135] Hingga termasuk konvensi di dunia jurnalisitik yang membantu jurnalis dalam menentukan apa yang bernilai dari berita itu. Mulai dari letak geografis pusat berita, pengendalian ihwal yang tak teduga, persyaratan pengolahan berita, format dramatis, hingga pertimbangan biaya. Hal ini perlu dipahami oleh para politikus, pejabat, atau aktivis dalam membangun komunikasi politik yang efektif.

Karena subjek pada penelitian ini adalah jurnalis, maka perlu dijelaskan sedikit gambaran tentang dua karakteristik jurnalis.

[134]Ardial, *Komunikasi Politik*...,176.
[135]BambangHarymurti, WakilKetuaDewanPers: KonsepPersProfesionalMenurutKodeEtikJurnalistikdan UU Pers.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, secara tradisional reporter tidak berasal dari ras dan etnik, tetapi belakangan ini, perekrutan yang giat dan kurang diskriminatif oleh berbagai organisasi berita telah berangsur-angsur mengurangi ketidakseimbangan. Kedua, tidak jelas apakah orientasi politik jurnalis lebih cenderung kepada liberal ketimbang kepada konservatif. [136]

Sebelumnya terdapat penelitian-penelitian tentang jurnalis, sebagaimana tercantum pada bab penelitian terdahulu. Tetapi, penelitian tentang studi jurnalis partisan di Kota Surabaya ini relatif berbeda. Jadi, perlu juga dijelaskan tentang komunikator politik sebagai partisipan politik, sebagai bahan kebutuhan penelitian.

5. Komunikator Politik sebagai Partisipan Politik

Menurut Miriam Budiardjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak, memengaruhi kebijakan pemerintah.[137] Kegiatan yang mencakupi antara lain: pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan *contacting* atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah, menjadi anggota partai, atau salah satu gerakan sosial, dan sebagainya.

Sementara partisipan dalam komunikasi politik menurut Dan Nimmo adalah anggota khalayak yang aktif tidak hanya memerhatikan apa yang dikatakan oleh para pemimpin politik, tetapi juga

[136]John C. Merril dan Ralph L. Lowenstein, *Media, Messages, and Men,* David McKay, (New York, 1971), 110.
[137]Miriam Budiardjo, *Dasar-DasarIlmuPolitik*, (Jakarta: Gramedia 1956), 367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menanggapi dan bertukar pesan dengan pemimpin itu. [138] Ringkasnya, partisipan politik, baik tipe-tipe orang profesional atau aktivis, melakukan kegiatan bersama para pemimpin politik, yaitu mereka sama-sama merupakan komunikator politik. James Rosenau membagi dua perangkat utama warga negara yang merupakan partisipan dalam komunikasi politik. Pertama, terdiri atas orang-orang yang sangat memerhatikan politik, tidak hanya selama tahun-tahun pemilihan umum, tetapi juga di antara pemilihan umum yang satu dan pemilihan umum berikutnya. Contoh dari perangkat ini ialah pengamat politik. Kedua, orang-orang yang menghubungi dan bertukar pesan dengan pemimpin pemerintahan dan bukan pemerintahan. Pada gilirannya para pemimpin politik, memobilisasikan partisipan ini untuk mendukung atau menentukan kebjiakan atau tujuan yang diusulkan. Maka, perangkat kedua dari partisipan ini terdiri atas orang-orang yang tidak hanya menaruh minat dan atentif, tetapi juga dimobilisasi.[139]

Setiap mengambil bagian dalam politik, orang memiliki cara berbeda-beda. Sebagaimana gaya dan pembicaraan politik (seperti antara singkat dan bertele-tele), gaya umum partisipasi pun bervariasi. Langsung/wakilan, adalah orang yang melibatkan sendiri (aktual) dengan hubungan yang dilakukan terus-menerus dengan figur politik, melalui telepon, mengirim surat, dan mengunjungi kantor pemerintah. Sedangkan wakilan ialah mereka yang bertindak terhadap politikus,

[138]Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*, teny. Jalaluddin Rakhmat (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 126.
[139]Ibid, 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi tidak bersama mereka. Misalnya, menonton televisi untuk mengetahui siapa yang terpilih menjadi presiden atau wali kota.

Kentara/tak kentara, adalah seseorang yang mengatakan opini politik guna meningkatkan kemungkinan diperolehnya keuntungan material, seperti jika mendukung kandidat politik dengan imbalan diangkat menduduki jabatan di pemerintahan. Gaya ini melibatkan keuntungan yang kentara dan instrumental. Lalu gaya partisipasi yang tak kentara dan bersifat evaluatif, misal upaya untuk mendemonstrasikan keunggulan statusnya kepada kawan-kawan. Individual/kolektif, yakni gaya partisipasi yang biasanya terjadi saat masih kanak-kanak, dan bersifat individu ketika turut memberikan suara atau mengirim surat kepada pejabat, dan sebagainya.

Sedangkan bentuk partisipasi kolektif akan tumbuh ketika seseorang telah dewasa ketika memutuskan bergabung dengan partai politik atau aktif dalam serikat buruh.Sistematis/acak, yaitu beberapa individu berpartisipasi dalam politik untuk mencapai tujuan tertentu, mereka bertindak bukan karena dorongan hati melainkan berdasarkan perhitungan: pikiran, perasaan, dan usul mereka untuk melakukan sesuatu yang bersifat konsisten.

Sementara gaya acak adalah individu-individu yang dalam partisipasinya politiknya tidak teguh yang sewaktu-waktu berubah tergantung situasi dan intensitas individu tersebut. Terbuka/tersembunyi, adalah orang yang mengungkapkan opini politik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan terang-terangan dan tanpa ragu-ragu, dan menggunakan berbagai alat yang dapat diamati dalam partisipasi terbuka. Sedangkan yang tersembunyi merupakan orang yang sangat berhati-hati dalam pandangannya, dan selalu merahasiakan pilihannya. Seperti ditunjukkan dalam skandal Watergate di tahun 1970, ketika memainkan peran tersembunyi dalam partisipasi yang tidak hanya sebagai pengikut, tetapi juga dalam gaya tokoh politik utama, termasuk presiden Amerika Serikat.

Berkomitmen/tak berkomitmen, orang yang sangat mendukung tujuan, kandidat, dan program calon kandidat politik. Namun yang tidak berkomitmen bercirikan menganggap pemilihan umum sekadar memilih antara calon satu dan calon lain tidak ada bedanya. Derita/kesenangan, seseorang yang menaruh perhatian politik dan melibatkan deritanya karena kegiatan politik sendiri merukapan kegiatan yang menyenangkan. Mereka ingin lebih berpengetahuan atau memenangkan argumentasi. Lalu, yang disebut derita komunikasi adalah orang yang menikmati keiukutsertaan dalam politik semata hal itu menyenangkan tanpa tujuan memetik ganjaran dan kesenangan komunikasi.[140]

Seperti gaya partisipasi komunikator politik yang berbeda-beda, motif yang diberikan seorang komunikator politik dalam meningkatkan atau menekan partisipasi politik juga cenderung

[140]Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda dalam beberapa hal: Sengaja/tak sengaja. Bagi mereka yang sengaja menjadikan kegiatan politik untuk suatu tujuan, mereka akan mencari informasi dan peristiwa politik untuk mencapai mewujudkan tujuan yang diinginkan. Seperti seseorang yang berhasrat memengaruhi suara legislator atau mengarahkan kebijaksanaan pejabat pemerintahan. Sedangkan yang lain melakukan kegiatan politik sebatas kebetulan atau tak disengaja. Misal ketika seseorang terlibat dalam cerita politik atau menemukan stiker kampanye di mobil.

Rasional/emosional. Motivasi secara rasional adalah ketika seseorang berhasrat mencapai tujuan tertentu dengan teliti, mempertimbangkan alat alternatif yang digunakan, lalu memilih yang paling menguntungkan dipandang dari segi pengorbanan dan hasilnya. Sebaliknya, beberapa orang bertindak tanpa berpikir, semata karena dorongan hati. Kebutuhan psikologis/sosial. Orang yang memproyeksikan kebutuhan psikologisnya dalam objek-objek politik. Contoh ketika seseorang mendukung pemimpin politik karena kebutuhan mendalam untuk tunduk pada autoritas, atau memproyeksikan dirinya pada berbagai “musuh” politik seperti partai oposisi atau negara asing. Namun bagi yang lain, menggunakan politik sekadar meningkatkan persahabatan sosial, hingga mengidentifikasi diri dengan status orang-orang yang statusnya diinginkan. Diarahkan dari dalam/luar. Motif partisipasi politik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diarahkan dari dalam adalah seseorang yang bereaksi sendiri karena dorongan batiniah seperti diperoleh dari bimbingan orang tuanya. Lalu yang diarahkan dari luar yaitu manakala seseorang lebih menanggapi berdasarkan orientasi yang diperoleh dari lingkungan yang lebih luas. Motif seorang komunikator yang diarahkan dari luar cenderung bersifat kosmopolitan.

Berpikir/tanpa berpikir. Setiap orang berbeda dalam tingkat kesadarannya ketika menyusun tindakan politik. Perilaku yang dipikirkan meliputi interpretasi aktif tindakan seseorang dan perkiraan konsekuensi tindakan itu terhadap dirinya dan orang lain. Sementara motif yang tanpa berpikir, biasanya seseorang yang tidak bermaksud ikut dalam peristiwa semacam demonstrasi, tapi tetap terseret oleh keadaan dan kejadian. Konsekuensi partisipasi politik yang mempolitikkan. Pertama fungsional atau disfungsional, di mana setiap orang yang berpartipasi dalam pemberian suara namun hanya dipersepsikan sebagai kewajiban kewargenaraan. Sedangkan yang disfungsional adalah orang yang ingin menggulingkan seluruh aparat pemerintah, tapi pemberian suara itu tidak membantu banyak tujuan tesebut.

Selanjutnya konsekuensi yang bersifat sinambung atau terputus, apabila partisipasi politik seseorang membantu meneruskan situasi, program, pemerintah, atau keadaan yang berlaku, maka konsekuensinya sinambung. Namun jika partisipasi tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengganggu kesinambungan kekuatan yang ada, mengancam stabilitas, maka partisipasi terputus. Konsekuensi ketiga yaitu mendukung atau menuntut, adalah tindakan orang yang menunjukkan dukungan terhadap rezim politik yang ada melalui pemberian suara, mematuhi hukum, menyanyikan lagu kebangsaan. Lalu yang bersifat menuntut adalah ketika mereka mengajukan tuntutan kepada pemerintah, mulai dari melakukan petisi melalui surat hingga menarik kembali dukungan finansial dari kampanye kandidat. [141]

B. Teori Fenomenologi Alfred Schutz

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, *Phainoai* yang berarti 'menampak, dan *Phainomenon*yang berarti 'yang menampak'. Jika ditelusuri lebih lanjut istilah fenomenologi berasal dari dua kata, yakni *Phenomenon*yang artinya realitas yang tampak, dan *Logos*yang berarti ilmu. Maka fenomenologi dapat dipahami sebagai ilmu yang berorientasi untuk mendapat penjelasan dari realitas yang tampak.

Alfred Schutz sering dijadikan pusat penerapan metodelogi penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Pertama, karena melalui Schutz pemikiran dan ide Husserl yang dirasa abstrak dapat dijelaskan lebih gamblang dan mudah dipahami. Kedua, Schutz merupakan orang pertama yang menerapkan fenomenologi dalam penelitian ilmu sosial.[142] Perspektif yang dipakai Schutz untuk

[141]Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 131.
[142]Henry J.Schamandt, *Filsafat Politik: Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memahami kesadaran itu dengan konsep intersubyektivitas (pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain).[143]

Dalam hal ini, Schutz meletakkan manusia dalam pengalaman subjektif baik dalam bertindak dan mengambil sikap dalam kehidupan sehari-hari. Dunia tersebut adalah kegiatan praktis. Di mana manusia mempunyai kemampuan untuk menentukan atau melakukan apa pun yang berkaitan dengan dirinya atau pun orang lain.. Jadi, kehidupan sehari-hari manusia bisa dikatakan seperti proyek yang dikerjakan dirinya sendiri karena setiap manusia memiliki keinginan-keinginan tertentu yang itu mereka berusaha mengerjakannya dan mengejarnya demi tercapainya orientasi yang telah diputuskan.[144]

Dalam mempelajari dan menerapkan fenomenologi sosial ini, Schutz mengembangkan juga model tindakan manusia *(human of action)* dengan tiga dalil umum:[145]

a. *The postulate of logical consitency* (Dalil Konsistensi Logis). Ini berarti konsistensi logis mengharuskan peneliti untuk tahu validitas tujuan penelitiannya agar dapat dianalisis bagaimana hubungannya dengan kenyataan kehidupan sehari-hari. Apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak.

---

[143]Engkus Kuswarno, *Teori Fenomenologi*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), 2.
[144]George Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010), 94.
[145]Yeremenia Djefrie Manafie, *Teori Fenomenologi Sosial Modern*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *The postulate of subjective interpretation* (Dalil Interpretasi Subyektif). Menuntut peneliti untuk memahami segala macam tindakan manusia atau pemikiran manusia dalam bentuk tindakan nyata. Maksudnya peneliti harus memposisikan diri secara subyektif dalam penelitian agar benar-benar memahami manusia yang diteliti dalam fenomenologi sosial.

c. *The postulate adequacy* (Dalil Kecukupan). Dalil ini mengamanatkan peneliti untuk membentuk konstruksi ilmiah (hasil penelitian) agar peneliti dapat memahami tindakan sosial individu.

Lebih lanjut, Schutz menyebutnya dengan konsep motif. Di mana oleh Schutz dibedakan menjadi dua pemaknaan dalam konsep motif. Pertama adalah motif *in order to,* motif yang dijadikan pijakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertujuan mencapai hasil. Kedua motif *because of,* motif yang melihat kebelakang. Secara sederhana bisa dikatakan pengidentifikasian masa lalu sekaligus menganalisanya sampai seberapa ia memberikan kontribusi dalam tindakan selanjutnya.[146]

[146]Ibid., 270.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, karena metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang yang diamati atau diarahkan pada latar dan individu secara holistik.[147] Tujuan penelitian kualitatif ini agar peneliti lebih mengenal lingkungan penelitian, dan dapat terjun langsung ke lapangan. Berdasarkan definisi yang sudah dipaparkan di atas, peneliti akan turun langsung ke informan yang diteliti, yaitu dua jurnalis di Kota Surabaya yang bergabung dengan partai politik.

B. Penentuan Lokasi

Dalam tradisi penelitian kualitatif, penelitian tidak ditujukan untuk membuat generalisasi atas suatu fenomena atau realitas sosial, melainkan upaya memberi pemahaman atas suatu gejala tersebut. Oleh sebab itu, dibutuhkan lokasi sosial tertentu pada penelitian kualitatif sebagai latar alamiah permasalahan dan pijakan, dalam memberi suatu pemahaman atau gambaran secara menyeluruh. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di kantor DPRD Kota Surabaya di Jl.Yos Sudarso, dan beberapa tempat yang fleksibel mengikuti informan. Penentuan lokasi penelitian ini berdasar atas beberapa hal di antaranya, pertama karena dari sumber yang peneliti dapatkan, kedua jurnalis partisan tersebut adalah jurnalis di pos politik di Kota Surabaya. Kedua, kantor DPRD Kota Surabaya adalah

[147] LexyJ. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007),3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu tempat sentral berkumpulnya jurnalis-jurnalis politik dari berbagai media massa di Kota Surabaya.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data-data diperoleh.[148] Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa sumber data tertulis, foto merupakan data tambahan sebagai pelengkap atau penunjang data utama.[149] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Dengan demikian sumber data yang diinginkan dapat terpenuhi

1. Data Primer

Data primer ialah sumber data utama dan kebutuhan mendasar dari penelitian ini. Beberapa informan akan dipilih sesuai kebutuhan penelitian, dan berkaitan dengan tema penelitian. Sedangkan informan adalah orang yang bisa memberikan informasi tentang situasi dan juga kondisi latar penelitian. [150] Dengan demikian, informan yang termasuk dalam data primer dan akan diwawancarai di penelitian ini adalah jurnalis partisan di Kota Surabaya, yakni:

a. Tri Wahyudi, jurnalis politik dari media online skalanews.com, tergabung dalam pengurusan Partai Demokrat.
b. Rofik Hardian, jurnalis politik dari media online mediabidik.com, tergabung dan menjadi kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

---

[148]Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992),102.
[149] Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 112.
[150]Moleong, *Metode Penelitian* .., 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari tangan kedua, atau dikumpulkan berdasarkan literatur-literatur atau referensi yang sudah dilakukan terlebih dahulu. Pada penelitian ini, yang merupakan sumber dari data sekunder antara lain: buku, jurnal, koran, artikel, browsing internet, hingga dokumentasi pribadi.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah yang diinginkan. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak dikenal dengan populasi atau sampel. Melainkan, subyek yang merujuk pada orang atau kelompok yang dijadikan unit atau satuan (kasus) untuk diteliti. Untuk menentukan subyek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.[151] Hal ini bertujuan lantaran orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan. Juga mungkin informan ialah penguasa yang memiliki kompetensi dan keterampilan tertentu, hingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek dan situasi sosial yang diteliti.

Sesuai kriteria di atas, informan yang dipilih dalam penelitian ini antara lain:

6. Tri Wahyudi
7. Rofik Hardian

[151] Ibid., 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Maulana, ketua Kelompok Kerja (POKJA) jurnalis politik di Dewan Kota Surabaya.
9. Didai Rosadi, jurnalis politik independen dari media cetak Harian Bangsa, di Dewan Provinsi Jawa Timur di Kota Surabaya.
10. Abdurrahman Ubaidah, pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara-cara yang dilakukan peneliti guna mendapat data yang mendukung penelitiannya. Terkait penelitian ini, peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data:

1. Metode Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. [152] Jenis observasi yang dilakukan ialah observasi non-partisipan, di mana peneliti tidak terlibat langsung, melainkan sekadar sebagai pengamat.

Metode ini peneliti digunakan untuk mengadakan pengamatan agar memperoleh data mengenai:

a. Letak geografis dari lapangan yang hendak diteliti

[152] Chalid Narbuko dan Achmadi. *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sikap dan karakter narasumber, dimungkinkan agar narasumber dapat memberi respon yang baik dan tidak tersinggung dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti.

Pada tahap observasi non-partisipan kali ini, medium alat bantu yang digunakan peneliti untuk menggali data adalah kamera dan *voice recorder* melalui ponsel. Di mana kamera digunakan mendapatkan gambar informan, sementara *voice recorder* sebagai alat perekam suara selama proses wawancara dengan informan berlangsung.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara *interview* (tanya jawab) sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan yang diwawancarai.[153] Dalam penelitian ini, wawancara menjadi hal yang sangat penting dengan wawancara peneliti dapat mengetahui secara langsung jawaban atas rumusan masalah yang diteliti. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka. Pada wawancara terbuka, jawaban atau keterangan yang dikehendaki dari subyek penelitian tidak terbatas.[154] Sehingga subyek dapat menjelaskan apa pun informasi yang diketahui, dan ditampung oleh peneliti dalam bentuk catatan. Kemudian data tersebut akan dirapikan dalam tahap penyusunan data.

[153]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 151.
[154] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan semi struktur. Sehingga sebelum melakukan wawancara, peneliti lebih dulu membuat pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan. Pedoman ini tidak dimaksudkan membatasi proses tanya jawab, tapi untuk membimbing peneliti dalam pendalaman wawancara yang dilakukan. Agar wawancara berjalan sesuai dengan topik permasalahan yang telah ditentukan.

Fokus dalam penelitian ini telah diarahkan kepada jurnalis partisan di Kota Surabaya. Dengan wawancara penelitian yang dilakukan mulai dari dua jurnalis partisan, ketua kelompok kerja jurnalis politik di Surabaya, jurnalis politik yang independen, serta pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Informan juga dibebaskan menjawab sesuai isi pikiran dan hati masing-masing. Durasi wawancara tidak ditentukan dan juga di akhiri menurut keinginan wawancara. Dengan demikian pewawancara dapat memperoleh gambaran yang lebih luas tentang masalah itu. [155]

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang.[156] Dalam penelitian ini, menggunakan dokumen tertulis dapat berupa media cetak sebagai bahan bukti yang

[155] Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), 17-19.
[156] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi "Mixed Method*", (Bandung: Alfabeta, 2011), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

relevan dengan penelitian, seperti foto saat wawancara, rekaman suara, buku-buku ilmiah, dan koran.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif berdasarkan pada pendekatan yang digunakan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif dengan cara mengumpulkan data, mengurutkan kemudian menganalisisnya dengan teori yang sudah ditentukan.[157] Mengikuti konsep Miles dan Huberman, teknik analisis data kualitatif sebagai berikut:[158]

1. **Reduksi Data**

   Reduksi data adalah merangkum dari hasil data yang diperoleh selama penelitian. Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu memilih hal-hal penting, dan mencari tema. Dalam hal ini, peneliti harus segera menganalisa data melalui reduksi data, ketika peneliti mendapat data dari lapangan dalam jumlah yang cukup banyak. Hasil dari reduksi data tersebut, peneliti telah memfokuskan pada Jurnalis Partisan di Kota Surabaya.

2. **Penyajian Data**

   Pada tahap penyajian data, peneliti akan menyajikan data-data yang diperoleh dari lapangan. Penyajian data sendiri adalah mengorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian hubungan antar kategori.

---

[157] Suharsini Arikunto, *Prosedur* ..,24.
[158]Sugiono,*Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selama menyajikan data, huruf besar, huruf kecil, dan angka disusun dalam urutan sehingga strukturnya bisa dipahami. Mengingat sifat fenomena sosial yang cenderung kompleks dan dinamis, sehingga apa yang diperoleh saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Sebab itu, peneliti harus selalu menguji apa yang ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetis itu berkembang atau tidak.

Apabila selama terjun di lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu didukung data pada saat dikumpulkan di lapangan, maka hipotesis tersebut terbukti. Jika pola-pola yang ditemukan didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola baku dan tidak lagi berubah. Selanjutnya, pola tersebut akan disajikan pada laporan akhir penelitian.

3. Verifikasi

Tahap selanjutnya dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan. Peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, di mana yang terkait dengan Jurnalis Partisan di Kota Surabaya. Verifikasi penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi, periset kualitatif mencari makna dari setiap gejala yang didapat dari lapangan. Selama penelitian masih berlangsung, setiap kesimpulan yang ditetapkan akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terus diverifikasi hingga benar-benar diperoleh konklusi yang valid dan kokoh.[159]

G. Teknik Keabsahan Data

Agar sebuah penelitian dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan keabsahan data salah satu metodenya menggunakan Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. [160] Jadi triangulasi merupakan cara tepat untuk menghilangkan perbedaan realitas dalam suatu konteks yang diteliti saat pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungan berbagai pandangan. Dengan demikian, peneliti dapat mengecek kembali temuannya dengan membandingkan terhadap berbagai sumber, metode atau teori. Untuk itu, maka peneliti dapat melakukannya melalui wawancara dengan jurnalis partisan di Kota Surabaya dan informan-informan lain yang sesuai dengan tema penelitian.

[159]Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: 2006), 22.
[160] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, 327-330.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wilayah Kota Surabaya sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Timur terletak di bagian utara Jawa Timur. Pada sisi timur Kota Surabaya berbatasan dengan Selat Madura dan Laut Jawa, lalu di sisi selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, sementara di sisi barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik. Sekarang Kota Surabaya sudah terhubung dengan Pulau Madura melalui jembatan Suramadu.[161]

Penelitian ini dilakukan di pers *room* Kantor DPRD Kota Surabaya, jalan Yos Sudarso No. 18-22 di sisi timur Kota Surabaya, serta di beberapa titik lokasi lain sesuai keberadaan narasumber yang bersangkutan.

2. Profil Jurnalis Politik di Kota Surabaya

Aktifitas pemberitaan ragam peristiwa yang terdapat di berbagai sumber media massa tidak lepas dari karya seorang jurnalis di lapangan. Tugas seorang jurnalis adalah menyampaikan informasi-informasi secara aktual, independen, dan berimbang, ke masyarakat sebagaimana layaknya sebuah produk jurnalistik. Setiap jurnalis, apa pun medianya, memiliki sumber pemberitaan masing-masing yang ditentukan oleh kepala redaksi perusahaan. Mulai bidang ekonomi, pendidikan, politik, kriminal, hukum, hingga kesehatan. Kemudian setiap jurnalis akan bergabung dengan rekan-

[161]https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya. (22 Januari 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rekan jurnalis lain dari media cetak (koran), televisi, radio, dan internet, lalu berada dalam naungan Kelompok Kerja (Pokja) sesuai pos-pos mereka bertugas. Dalam tugasnya, jurnalis mendapatkan hak-hak istimewa yang meliputi: perlindungan dari undang-undangtentang kebebasan berpendapat, berhak memakai bahan-bahan, aneka dokumen dan pernyataan-pernyataan publik, diperbolehkan menyentuh ranah pribadi seseorang atau publik figur dalam mencari informasi yang akurat sebagai tindakan perwakilan mata dan telinga publik.

Meski demikian, terdapat undang-undang yang mengatur profesi seorang jurnalis dalam pemberitaan.Mengacu pada UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, pasal 1 yang berbunyi: Jurnalis Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.[162] Kemudian dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 3 yang berbunyi: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.[163]

[162]Bambang Harymurti, Wakil Ketua Dewan Pers: *Konsep Pers Profesional Menurut Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers.*
[163]Bekti Nugroho, *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas,* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan, 2013), 293.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun terdapat undang-undang yang mengatur tata kerja seorang jurnalis serta panduan peliputan dalam Kode Etik Jurnalistik, namun diketahui ada beberapa jurnalis yang bersikap tidak independen. Hal ini mengacu pada temuan dua jurnalis di Kota Surabaya yang tergabung dengan partai politik. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kedua jurnalis partisan tersebut berasal dari media online yang bertugas di pos politik, DPRD Kota Surabaya. Pertama, Tri Wahyudi dari media online skalanews.com yang bergabung dengan Partai Demokrat, lalu Rofik Hardian dari media online bidik.com yang bergabung dengan Partai Nasional Demokrat (NasDem). Meski keduanya jurnalis tersebut tahu atas keberadaan UU tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik, mereka menyatakan bahwa ada motif-motif tertentu yang membuat mereka memutuskan bergabung dengan sebuah partai politik.Bentuk independensi kedua jurnalis tersebut, yakni dengan menyiarkan informasi-informasi baik yang bersifat *news* (murni berita politik) juga informasi yang bersifat pencitraan masing-masing parpol melalui media online tempat mereka bekerja demi kepentingan pribadi.

Sikap kedua jurnalis partisan tersebut ternyata menuai tanggapandari berbagai sumber yang peneliti peroleh.Mereka adalah Maulana (Ketua Pokja jurnalis politik Kota Surabaya), Abdurrahman Ubaidah (Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur), dan Didai Rosadi (Jurnalis politik independen media online Kota Surabaya). Secara umum mereka menjelaskan bahwa tidak pernah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempermasalahkan seorang jurnalis politik bergabung dengan partai politik, karena itu merupakan hak setiap warga negara untuk berpolitik. Kedua, sudah hal yang wajar ketika seorang jurnalis politik dengan kemampuannya bertahun-tahun menelaah arah kondisi perpolitikan dan kekuatannya di jejaring informasi, menjadikan dirinya sebagai kader atau pengurus sebuah partai politik. Namun, ketika diketahui status kedua jurnalis tersebut masih aktif sebagai jurnalis, ini yang menurut pandangan mereka dianggap berbahaya dalam segi pemberitaan.Sebab hal ini yang akan menyebabkan benturan dualisme kepentingan antarprofesi tak terhindarkan. Profesi sebagai jurnalis dengan kepentingan menyampaikan informasi secara adil dan akurat ke masyarakat, kemudian profesi sebagai politisi yang berkepentingan menyalurkan informasi-informasi politik ke berbagai masyarakat. Berikut struktur organisasi pengurus dan daftar jurnalis politik di DPRD KotaSurabaya:

Tabel 1: Struktur Organisasi Pokja Jurnalis Politik Surabaya

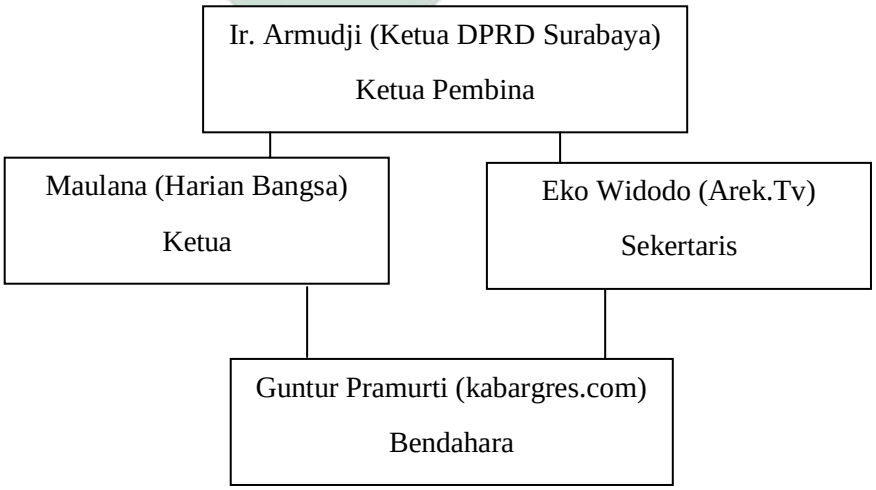

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 2: **Daftar Jurnalis Politik Media Massa Surabaya**

a. Jurnalis politik media cetak (koran)

No	Nama	Media
1.	Salman	Jawa Pos
2.	Faiq	Surya
3.	Al Qomar	Surabaya Pagi
4.	Abdul Aziz	Duta Masyarakat
5.	Andre	Koran Birawa
6.	Udin	Memorandum
7.	Suwanto	Koran Nusantara

b. Jurnalis politik media elektronik (televisi)

No	Nama	Media
1.	Faini	SBO.TV
2.	Dewi	J.TV
3.	Setadi	Surabaya.TV
4.	Vinsa	Kompas.TV

c. Jurnalis politik media elektronik (radio)

No	Nama	Media
1.	Indri	Radio Republik Indonesia (RRI)
2.	Alam	Mercuri.FM

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Jurnalis politik media internet (online)

No	Nama	Media
1.	Deni	Detik.com
2.	Fatimatus Zahro	Tribunnews.com
3.	Fajar	IDNnews.id
4.	Abdul Hakim	Antara.com
5.	Paksi	Kumparan.com
6.	Ibnu	Beritajatim.com
7.	Iwan	LensaIndonesia.com
8.	Rofik Hardian	Mediabidik.com
9.	Hadi	Cakrawalanews.com
10.	Bambang	GlobalIndo.com
11.	Didai Rosadi	Bangsaonline.com
12.	Hamid	Surabayanewsfix.com
13.	Sumadji	Kampungberita.id
14.	Trisna	Kabarjagat.com
15.	Sadek	Rajawarta.com
16.	Tri Wahyudi	Skalanews.com
17.	Heri	Suarapubliknews.com
18.	Robi	D-onenews.com
19.	Bambang	Portalnasional.com
20.	Irwan	Beritasurabayaonline.com

Sumber: Profil Jurnalis Politik Kota Surabaya

Dalam profil yang diberikan oleh Maulana selaku ketua Pokja jurnalis politik, dapat diketahui jurnalis politik di Kota Surabaya saat ini berjumlah 36 orang.Dari jenis media massanya, jurnalis dari saluran komunikasi internet atau online adalah yang paling mendominasi. Hal ini karena perkembangan era digitalisasi serta kebutuhan masyarakat akan berbagai informasi yang cenderung cepat dan *up to date*. Sebagai ketua Pokja jurnalis politik Surabaya, Maulana juga melakukan beberapa verifikasi yang disepakati bersama seluruh anggota Pokja terkait jurnalis lain yang hendak bergabung dengan Pokja jurnalis politik di DPRD Kota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya. Verifikasi yang paling diutamakan ialah etika jurnalis itu sendiri dalam melakukan kerja jurnalistik. Yaitu jurnalis menunjukkan niat baiknya selama melakukan peliputan berita politik serta komitmen awal dalam hal ini tidak melakukan pemerasan atau hal-hal yang akan merugikan narasumber. Kemudian untuk mencegah bergabungnya jurnalis fiktif alias bodrek di Pokja jurnalis politik Kota Surabaya, umumnya jurnalis politik yang benar-benar ditugaskan di DPRD Kota Surabaya, akan menunjukkan surat resmi penugasan peliputan yang dikeluarkan redaktur perusahaan media massa mereka bekerja juga kartu identitas pers.

B. Hasil Penelitian dan Analisa

Data-data yang peneliti peroleh hasil dari lapangan disusun secara sistematis untuk menjelaskan jawaban dari permasalahan yang ada dalam skripsi. Informan-informan yang peneliti temui, diminta kesanggupannya untuk melakukan wawancara sehingga peneliti dapat menggali data tentangjurnalis politik partisan di Kota Surabaya. Dalam proses pencarian data, peneliti melakukan wawancara langsung dengan jurnalis partisan yang dijadikan informan kunci, yakni Tri Wahyudi (skalanews.com) dan Rofik Hardian (mediabidik.com). Serta pandangan dari beberapa informan lain yang sengaja peneliti pilih, karena dinilai mampu dan paham terkait bidang yang sedang diteliti, yakni Maulana selaku Ketua Pokja jurnalis politik Kota Surabaya; Abdurrahman Ubidah selaku pengurus PWI Jawa Timur; Didai Rosadi selaku jurnalis politik independen media online.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data-data yang ditemukan peneliti di lapangan nantinya peneliti analisa menggunakan teori komunikasi politik dan teori fenomenologi Alfred Schutz. Teori komunikasi politik digunakan karena bentuk partisipasi jurnalis sebagai penyampai informasi-informasi politik dari partai politik yang mereka naungi ke masyarakat, serta korelasinya terhadap independensi pemberitaan. Sementara teori fenomenologi Alfred Schutz digunakan untuk menganalisis motif keterlibatan jurnalis politik dengan sebuah partai politik.

1. **Motif Jurnalis Bergabung Partai Politik**

Terbukanya kran demokrasi Indonesia telah mendorong setiap kalangan masyarakat untuk memaksimalkan haknya dalam berpolitik. Tidak terkecuali seorang jurnalis. Miriam Budiardjo menyebut salah satu bentuk kegiatan partisipasi politik adalah menjadi anggota partai politik. Namun, tindakan dua jurnalis politik di Kota Surabaya yang bergabung dengan partai politik tak lepas dari motif-motif di dalamnya. Motif yang melatari seorang jurnalis masuk ke sebuah partai politik bisa dipengaruhi faktor internal maupun eksternal. Secara jelas, motif jurnalis bergabungdengan parpol bisa terlihat dalam wawancara dengan Rofik Hardian, jurnalis dari media online mediabidik.com,mengungkapkan sebagai berikut:

> "Ya, ada tawaran dari Partai NasDem.Karena selama saya ngepos di sini, terkait pemberitaan-pemberitaan saya, kami memiliki visi dan misi yang kurang lebih sama. Sisi kerja jurnalis saya yang kerap menyoroti program-program pemerintah, di samping itu juga sisi baiknya juga kita angkat, seolah hampir mirip dengan semangat Partai NasDem."[84]

[84]Rofik Hardian, *Wawancara*, Surabaya, 4 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu dalam wawancaranya, Tri Wahyudi jurnalis dari media online skalanews.com menjelaskan bahwa:

”Sebelumnya saya tidak ada motif khusus gabung dengan partai politik, Mas.Cuma waktu itu saya mulai dekat dengan Sekertaris DPD Demokrat, Mas Renville Antonio. Dengan *backround* saya sebagai jurnalis politik,saya ditawari jadi pengurus Demokrat di bidang humas.”[85]

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa motif yang mendorong kedua jurnalis politik bergabung dengan parpol ialah faktor eksternal.Di mana terdapat pihak dari parpol NasDem dan Demokrat yang menawarkan pada jurnalis untuk menjadi kadernya.Namun secara spesifik, ternyata terdapat tawaran atau janji dari partai politik terkait sehingga membulatkan sikapseorang jurnalis menjadi anggota sebuah partai. Hal ini yang terkutip dalam wawancara bersama Rofik Hardian:

”Aslinya, lebih enak asli jurnalis, Mas.Karena kalau kita di dunia politik, otomatis saya fokus dan terikat dengan partai tersebut.Tapi karena ini adalah panggilan hati dari partai NasDem yang nantinya merekom sayauntuk duduk di kursi legislatif dan membantu mengawal kebijakan pemerintah.”[86]

Hal serupa juga dialami oleh Tri Wahyudi, yang dalam wawancara menjelaskan bahwa:

“Saya juga ditawari untuk mengembangkan diri di dunia politik.Maju anggota legislatif dari Demokrat. Mengingat banyak orang-orang di Demokrat juga teman saya dulu angkatan ’98, bagi saya ini bagus untuk mengembangkan karir saya. Jadi saya terima.”[87]

Kesimpulan dari penjelasan Rofik Hardian dan Tri Wahyudi di atas

[85]Tri Wahyudi, *Wawancara*, Surabaya, 7 Januari 2019.
[86]Rofik Hardian, *Wawancara*, Surabaya, 4 Januari 2019.
[87]Tri Wahyudi, *Wawancara*, Surabaya, 7 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa motif kedua jurnalis tersebut untuk bergabung menjadi kader parpol lantaran adanya tawaran maju menjadi calon anggota legislatif dari masing-masing parpol. Di mana partai politik bersedia menjadi kendaraan politik bagi kedua jurnalis dengan cara saling mengakomodir kepentingannya masing-masing. Adapun tujuan mereka untuk terjun ke dunia politik karena murni kesadaran politik. Hal ini bisa dicermati motif kedua jurnalis partisan tersebut ketika disinggungtentang faktor lain, yakni ekonomi. Berikut adalah penuturan dari Rofik Hardian:

> "Jujur ya, Mas. Jurnalis dan menjadi anggota parpol adalah sebuah profesi, bukan pekerjaan.Profesiitu tidak pasti nilainya. Terpenting kita bekerja.Sebagai jurnalis saya menyebarkan berita ke masyarakat, dan di politik saya juga mengawal kebijakan pemerintah melalui aspirasi dan suara dari Partai NasDem.Menulis adalah kepuasaan tersendiri bagi kita."[88]

Sementara itu, berikut adalah penjelasan dari Tri Wahyudi yang menyebutkan bahwa:

> "Tidakada.Tidak ada sama sekali. Saya murni untuk mengembangkan diri. Jadi pengurus saja sudah kebanggaan bagi saya, Mas. Saya bisa bantu temen-temen (Demokrat) pencitraan Pilwali, Pilgub lewat online. Untuk menghargai kreatifitas saya, dari situ biasanya mereka ngasih saya honor." [89]

Pada tahap ini, peneliti akan menghubungkan fenomena tersebut dengan teori komunikasi politik, laludiperdalam dengan teori fenomenologi dari pemikiran Alfred Schutz.Jika ditinjau dari tujuan politik, hakikat komunikasi politik adalah upaya kelompok manusia yang mempunyai orientasi pemikiran politik atau ideologi tertentu demi menguasai dan memperoleh kekuasaan, dengan kekuatan sebagaimana

[88]Rofik Hardian, *Wawancara*, Surabaya, 4 Januari 2019.

[89]Wahyudi, *Wawancara*, Surabaya, 7 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan pemikiran dan ideologi politik tersebut dapat diwujudkan. Lasswell menjelaskan orientasi komunikasi politik dengan dua hal yang sangat jelas. Pertama, bahwa komunikasi politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan; nilai-nilai dan tujuan itu sendiri dibentuk dalam proses perilaku yang sesungguhnya merupakan suatu bagian. Kedua, bahwa komunikasi politik bertujuan menjangkau masa depan dan bersifat mengantisipasi serta berhubungan dengan masa lampau dan senantiasa memerhatikan kejadian masa lalu.

Menurut James Carey, jurnalis teridentifikasi dalam jenis komunikator politik professional. Komunikator professional adalah seorang makelar simbol yang menerjemahkan sikap, pengetahuan, dan minat suatu komunitas bahasa ke dalam istilah komunitas bahasa lain yang berbeda tetapi tetap dapat dimengerti.[90]Para profesional ini menjual keahliannya dalam memanipulasi, menjualkan, menghubungkan, dan menginterpretasikan kepada para politikus dengan yang lain. Sebagai komunikator profesional, jurnalis secara khas adalah karyawan organisasi berita yang menghubungkan sumber berita dengan khalayak. Motif yang diberikan seorang komunikator politik dalam meningkatkan atau menekan partisipasi politik juga cenderung berbeda-beda.Satu di antaranya adalah motivasi rasional/emosional. Rasional adalah ketika seseorang berhasrat mencapai tujuan tertentu dengan teliti, mempertimbangkan alat alternatif yang digunakan, lalu memilih yang

[90]Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media,*peny.Jalaluddin Rahkmat(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paling menguntungkan dipandang dari segi pengorbanan dan hasilnya. Sementara emosional, beberapa orang bertindak tanpa berpikir, semata karena dorongan hati.

Dari apa yang telah disampaikan kedua jurnalis di atas, jelas bahwa keputusan mereka bergabung dengan partai politik yakni termotivasi secara rasional. Mereka menginginkan tercapainya tujuan.Ketika memutuskan menjadi kader sebuah partai politik, serta menimbang dengan sadar kapasitasnya sebagai jurnalis politik, menjadi kesempatan bagi mereka untuk duduk di kursi legislatif lebih terbuka. Namun selain berorientasi pada kepentingan, bentuk motivasi jurnalis bergabung dengan partai politik sesungguhnya juga berangkat dari kesadaran diri guna mewujudkan harapannya terhadap sistem-sistem politik yang akan datang.

Alfred Schutz menjelaskan fenomenologi adalah menghubungkan antara pengetahuan ilmiah dengan pengalaman sehari-hari, dan dari kegiatan di mana pengetahuan dan pengalaman itu berasal.[91]Secara sadar dan penuh pertimbangan, baik Rofik Hardian maupun Tri Wahyudi, telah menggunakan profesi jurnalismenya dan media online tempat mereka bekerja sehari-hari, kemudian membagi berita-berita politik dari masing-masing partai politik yang menaungi dengan tujuan menjadi calon anggota legislatif. Dalam hal ini, Schutz menyebutnya dengan motif *in order to*, motif yang dijadikan pijakan oleh seseorang untuk melakukan

[91]Engkus Kuswarno, *Fenomenologi* (Bandung, Widya Padjadjaran, 2013) ,17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang bertujuan mencapai hasil. Kedua jurnalis tersebut menerima pinangan menjadi anggota parpol demi tujuan menjadi calon anggota legislatif. Hal tersebut selaras dengan apa yang dimaksud oleh Ramlan Surbakti bahwa dasar utama motif partisipasi politik seseorang adalah kesadaran. Bahwa kesadaran politik merupakan pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup.[92]

2. Pandangan Terhadap Independensi Jurnalis Partisan Dalam Pemberitaan

Berkaitan dengan temuan dua jurnalis politik media online di Kota Surabaya yang bergabung dengan sebuah partai politik, peneliti terlebih dahulu mewawancarai beberapa informan untuk dimintai pendapat terkait fenomena tersebut. Seperti penjelasan oleh Maulana, ketua Pokja jurnalis politik di Kota Surabaya, yang menyebut bahwa:

> "Jadi bergabungnya seorang jurnalis ke salah satu partai politik, menurut saya wajar. Bagaimanapun jurnalis menjadi ujung tombak arus informasi selama ini. Apalagi masalah-masalah politik, hampir sebagian besar jurnalis sangat memahami. Jadi, ketika jurnalis politik memutuskan bergabung di partai politik karena mereka sudah punya bekal." [93]

Begitu juga yang diungkapkan oleh Didai Rosadi, jurnalis politik independen media online di Surabaya, yang menjelaskan bahwa:

> "Menurut saya itu sah-sah saja. Karena sebagai warga negara, jurnalis juga punya hak untuk memilih atau dipilih. Saya kira itu wajar. Karena jurnalis itu punya kesempatan besar dengan bergabung dengan partai politik. Karena mereka punya akses kepada partai politik maupun elit-elit politik itu sendiri. Biasanya, hubungan yang dekat ini akan meningkat menjadi kader atau pengurus partai."[94]

---

[92]Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 199), 144.
[93]Maulana, *Wawancara*, Surabaya, 11 Januari 2019.
[94]Didai Rosadi, *Wawancara*, Surabaya, 13 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pandangan informan selanjutnya adalah Abdurrahman Ubaidah, pengurus PWI Jawa Timur, yang menyebut ada faktor tertentu yang mendorong jurnalis politik menjadi anggota partai politik. Selengkapnya bisa disimak dalam wawancaraberikut:

> "Pasti ada kepentingan tertentu atau tawaran bisa seperti jabatan dan sebagainya, sehingga mendorong jurnalis tersebut mau melanggar independensi profesinya demi mendapat apa yang ingin dia inginkan. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi jurnalis politik bergabung dengan parpol adanya kedekatan.Hal ini yang cenderung membuat jurnalis merasa pas dengan partai politik, dan membuatnya melihat peluang atau keuntungan yang lain."[95]

Seperti yang telah diungkapkan oleh Maulana, Didai Rosadi, dan Abdurrahman Ubaidah, bahwa tidak ada yang perlu disangsikan ketika seorang jurnalis bergabung dengan sebuah parpol. Terlebih jurnalis di bidang politik. Karena seorang jurnalis politik telah memiliki nilai lebih dari profesi-profesilain, sehingga lazim jika parpol merekurutseorang kader dari *background* jurnalis. Terlepas dari itu, bagaimanapun juga jurnalis adalah warga Negara Indonesia dan disertai hak-haknya untuk berpolitik.

Namun, masalah yang muncul selanjutnya adalah ketika diketahui ternyata kedua jurnalis partisan tersebut, yakni Tri Wahyudi ke Partai Demokrat, dan Rofik Hardian ke Partai NasDem status profesi kejurnalismeannya masih aktif. Kemudian dari wawancara dengan kedua jurnalis partisan yang bersangkutan ternyata kerap menyampaikan berita-berita pencitraan masing-masing parpol melalui media online tempat

[95]Abdurrahman Ubaidah, *Wawancara*, Surabaya 15 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka bekerja. Adapun penjelasannya bisa dilihat dari penuturan Tri Wahyudi sebagai berikut:

"Karena media itu banyak, Mas. Kalau media partai terbatas pada komunitas itu sendiri. Jadi kalau mau mengembangkan ke luar seperti informasi tentang Partai Demokrat dengan tujuan sampai ke masyarakat, parpol harus menggandeng media online."[96]

Selanjutnya penjelasan dari wawancara bersama Rofik Hardian yang menyebutkan bahwa:

"Karena kalau sebuah partai hanya mengandalkan, istilahnya humas partai, itu kurang kuat, Mas.Maka sebuah partai politik yang ingin menyampaikan visi dan misi politiknya, pasti membutuhkan media massa yang bercorak politik agar sampai ke masyarakat."[97]

Kemudian peneliti dalam wawancaranya juga memperoleh gambaran dasar teknis cara menyampaikan berita-berita politik yang bersifat kepentingan parpol tersebut ke masyarakat, yang pertama akan dijelaskan oleh Tri Wahyudi:

"Ya, beritanya harus dimurnikan dulu, Mas. Harus ada klarifikasinya dari yang bersangkutan. Ada sumbernya. Narasumber bisa dipertanggungjawabkan. Pokoknya semuanya lengkap, lalu kita olah menjadi sebuah berita dengan kemampuan kita sendiri."[98]

Hal senada juga diutarakan oleh Rofik Hardian, yang dalam wawancaranya menerangkan bahwa:

"Jadi, contoh ketika sebelum humas dari NasDem merilis sebuah berita tentang kinerja para kader, saya baca lebih dulu. Apakah benar berita ini A1, atau sumbernya dari mana.Jadi saya konfirmasi lagi, langsung ke sumbernya sendiri. Jika itu memang akurat, ya tidak ada salahnya saya bagi berita tersebut ke teman-teman jurnalis lain."[99]

---

[96]Wahyudi, *Wawancara*, Surabaya, 7 Januari 2019.
[97]Rofik Hardian, *Wawancara*, Surabaya, 4 Januari 2019.
[98]Wahyudi, *Wawancara*, Surabaya, 7 Januari 2019.
[99]Rofik Hardian, *Wawancara*, Surabaya, 4 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tipe komunikasi politik yang digunakan kedua jurnalis partisan menurut Dan Nimmo adalah saluran komunikasi massa. Mereka menggunakan media online tempat kedua jurnalis partisan tersebut bekerja, yaitu skalanews.com dan mediabidik.com, sebagai alat saluran komunikasi penyampai berita-berita politik ke masyarakat. Padahal media massa saat ini memiliki peranan besar dalam membentuk opini publik. Media massa, apa pun salurannya, dalam komunikasi politik merupakan sumber kekuatan, sumber informasi, alat kontrol, manajemen, dan inovasidalam kehidupan masyarakat. Jika dirunut kembali, bahwa sikap jurnalis partisan yang demikian telah melanggar marwah profesionalitas profesi jurnalis. Alih-alih murni melayani publik dengan pemberitaan-pemberitan seputar informasi politik yang adil, independen, dan berimbang, mereka juga melayani pemberitaan politik demi kepentingan partai politik. Kecenderungan semacam ini, ternyata menaruh perhatian pada independensi kedua jurnalis partisan dalam pemberitaan.Berikut wawancara dengan Maulana yang menjelaskan bahwa:

> "Menurut saya, pengaruh jurnalis media online, khususnya jurnalis politik, besar kecilnya itu tergantung muatan *news* atau isu yang ada di dalamnya.Ketika isu politik itu menarik, maka peran media online itu sangat besar. Saat ini media online cenderung menjadi acuan untuk media massa seperti cetak, radio, dan sebagainya.Artinya, independensi pemberitaan seorang jurnalis yang telah 'tercemar' partai politik, patut dipertanyakan."[100]

Selain dari Maulana, peneliti juga menanyakan hal serupa kepada Didai Rosadi, yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa:

[100]Maulana, *Wawancara*, Surabaya, 11 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Itu sangat mempengaruhi independensi jurnalis yang bersangkutan.Karena pada prinsipnya setiap jurnalis punya tanggung jawab kepada publik.Jika ada jurnalis yang bergabung dengan partai politik pasti akan ada dualisme kepentingan. Kepentingan dia sebagai jurnalis, dan kepentingan dia sebagai kader partai."[101]

Pandangan selanjutnya mengenai independensi jurnalis pemberitaan dapat dilihat dari wawancara peneliti bersama Abdurrahman Ubaidah, yang menuturkan bahwa:

"Kalau sudah menjadi partisan pasti yang bersangkutan akan menyampaikan informasi pemberitaan secara membabi-buta. Dari sini jurnalis tersebut akan memainkan teknik-teknik jurnalistik dan dibumbui bagaimana kepentingannya sebagai anggota partai bisa masuk."[102]

Dari yang disampaikan oleh Maulana, Didai Rosadi, dan Abdurrahman Ubaidah, jelas bahwa jurnalis politik partisan telah mencoreng indepedensi profesi seorang jurnalis dalam menyampaikan berita. Karena turut menyebarkan berita-berita pesanan masing-masing parpol mengingat rangkap posisinya yang juga sebagai seorang politisi. Kantaprawira menyebut komunikasi politik selalu memfokuskan pada kegunaannya, yakni menghubungkan pikiran politik yang hidup di masyarakat, baik pikiran intra golongan, institusi, asosiasi, atau pun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah.[103] Pemberitaan-pemberitaan berita politik yang sudah tercemar kepentingan politis ini juga berdampak bagi publik yang sejatinya adalah penerima informasi.Terlebih di era saat ini, seperti yang diutarakan oleh Maulana jika media online sekarang cenderung menjadi corong bagi media massa yang lain. Mengingat juga karakteristik media

[101]Didai Rosadi, *Wawancara*, Surabaya, 13 Januari 2019.
[102]Abdurrahman Ubaidah, *Wawancara*, Surabaya 15 Januari 2019.
[103] Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik di Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

massa online yang unggul dalam sisi efektifitas, kecepatan, serta jangkauannya dalam pembagi informasi ke masyarakat dibanding koran, radio, atau televisi.

Dalam wawancara bersama Didai Rosadi dapat diketahui sedikit karakteristik indepedensi jurnalis partisan dalam pemberitaan:

> "Di situ pasti ada agenda-agenda partai yang masuk dalam tulisan jurnalis dan disebarluaskan dalam pemberitaan. Itu terbukti dengan beberapa teman jurnalis yang bergabung dengan partai politik tertentu, arah tulisannya akan condong menguntungkan parpol yang diikuti."[104]

Dalam teori komunikasi politik seorang jurnalis adalah kelompok komunikator professional. Namun jika kemudian merangkap menjadi kader sebuah partai, dan diketahui menyampaikan kepentingan-kepentingan partai politik dalam pemberitaan, otomatis jurnalis tersebut telah memposisikan diri komunikator politik sebagai partisipan politik .Dan Nimmo menjelaskan bahwa komunikator politik sebagai partisipan politik adalah anggota khalayak yang aktif tidak hanya memperhatikan apa yang dikatakan oleh para pemimpin politik, tetapi juga menanggapi dan bertukar pesan dengan pemimpin itu. [105]James Rosenau membagi dua perangkat utama warga negara yang merupakan partisipan dalam komunikasi politik. Dalam hal ini, jurnalis Rofik Hardian maupun Tri Wahyudi, termasuk dalam jenis perangkat yang tidak hanya menaruh minat pada pemimpin politik (Partai Demokrat atau Partai NasDem), namun kedua jurnalis tersebut juga turut saling bertukar pesan,

[104]Didai Rosadi, *Wawancara*, Surabaya, 13 Januari 2019.
[105]Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*, teny. Jalaluddin Rakhmat (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendukung, serta dimobilisasi oleh para pemimpin politik untuk menuntukan tujuan yang diusulkan.

Namun,selain ketidakindependensian kedua jurnalis partisan dalam pemberitaan lantaran telah menggunakan profesi jurnalis untuk mengakomodasi berita-berita pencitraan masing-masing parpol, yang dalam komunikasi politik disebut komunikator politik sebagai partisipan politik, ternyata pandangan lain juga muncul. Sebuah pandangan yang menjelaskan bahwa sikap jurnalis partisan yang aktif dalam sebuah partai politik, otomatis memengaruhi independensi profesi jurnalis itu sendiri dalam mencari berita-berita politik. Secara rinci bisa dilihat dari wawancara bersama Maulana:

> "Jurnalis politik yang benar-benar professional, sudah pasti paham isu-isu politik yang sedang berkembang, yang sudah berkembang, dan yang akan berkembang.Jurnalis bisa menjadi agen intelejen informasi.Tapi saat jurnalis bergabung partai politik tertentu, maka parpol yang lain akan tahu.Misalnya, jurnalis A sudah menjadi anggota partai politik B. Jadi saat jurnalis A mencari informasi ke partai politik lainnya, otomatis arus informasinya ditutup. Itu yang mempengaruhi kemurnian profesionalitas jurnalis dalam mencari informasi di lapangan tanpa tendensi atau kepentingan tertentu."[106]

Dalam wawancara dengan Maulana di atas, dapat diperoleh penjelasan bahwa indepedensi kedua jurnalis partisan itu telah tersandera dari sumber-sumber informasi politik. Hal ini bertentangan dengan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, pasal 1 yang berbunyi: Jurnalis Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.[107]Kemudian lebih dipertegas dalam

[106]Maulana, *Wawancara*, Surabaya, 11 Januari 2019.
[107] Bambang Harymurti, Wakil Ketua Dewan Pers: *Konsep Pers Profesional Menurut Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kode Etik Jurnalistik pasal 3 yang berbunyi: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.[108] Tugas kedua jurnalis tersebut yang harusnya melayani masyarakat dengan informasi-informasi yang akurat dan kredibel, kali ini telah mencemari independensi arus informasi ke publik melalui opini-opini pribadi dan pemberitaan masing-masing secara tidak proporsional.

Pada titik ini, peneliti melihat sebuah titik terang dari hasil-hasil wawancara di atas lewat permasalahan independensi dua jurnalis politik partisan media online di Surabaya dalam pemberitaan. Dalam bukunya *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*, Dan Nimmo mengatakan setiap mengambil bagian dalam politik, orang memiliki cara berbeda-beda. Sebagaimana gaya pembicaraan politik, gaya partisipasi komunikator politik pun bervariasi. Gaya partisipasi yang ditunjukkan oleh jurnalis Tri Wahyudi dan Rofik Hardian termasuk dalam gaya partisipasi terbuka/tersembunyi.

Secara terbuka, figur Tri Wahyudi serta Rofik Hardian telah menyiarkan berita-berita politik yang bermuatan kepentingan partai Demokrat dan partai Nasional Demokrat secara terang-terangan dengan menggunakan media online skalanews.com dan mediabidik.com ke masyarakat. Sedangkan maksud secara tersembunyi merupakan orang

[108]Bekti Nugroho, *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas,* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan, 2013), 293.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sangat berhati-hati dalam pandangannya, dan selalu merahasiakan pilihannya. Dapat diketahui bahwa gaya partisipasi kedua jurnalis partisan tersebut ialah gaya terbuka, alih-alih tersembunyi. Ternyata menurut pandangan Maulana dalam wawancaranya, dengan gaya kedua jurnalis serta statusnya yang merangkap menjadi seorang politisi ini akan melekat dan berpengaruh pada pembatasan keduanya ketika mengakses berita politik dari sumber partai politik yang lainnya. Dalam wawancara berikut ini dengan Maulana dapat terungkap bahwa gaya partisipasi terbuka semacam itu juga memiliki dampak independensi jurnalis itu sendiri bagi masyarakat, seperti dijelaskan di sini:

> "Karena nalar publik sekarang sudah cenderung kritis. Tapi ketika yang disebar adalah isu-isu politik yang tidak menarik seperti pencitraan politik, sosialisasi politik, atau kabar gembira, masyarakat cenderung bersikap apatis dan menganggap itu sudah menjadi hobinya partai politik. Maka, jika nalar publik sudah terbangun seperti itu, maka jurnalis partisan yang bersangkutan itu sudah sendirinya melunturkan profesionalisme kewartawanan dia sendiri."[109]

Dalam komunikasi politik terdapat pilihan konsekuensi politik bagi partisipasi politik yang mempolitikkan.Mulai dari konsekuensi fungsional hingga konsekuensi menuntut.Menurut peneliti, konsekuensi yang diambil oleh kedua jurnalis partisan media online tersebut adalah sinambung.Sebab meski keberadaan mereka telah mendapat semacam tanda dari partai politik selain partai tempat mereka bernaung, mereka

[109]Maulana, *Wawancara*, Surabaya, 11 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap melanjutkan keputusannya dengan tetap meneruskan situasi, program, pemerintah, atau keadaan yang berlaku.[110]

Pada tahap ini, secara sederhana peneliti akan memberi analisa bahwa partisipasi jurnalis partisan dalam pemberitaan tidak akan lepas dari independensi profesi jurnalis yang menyertainya. Melalui teori komunikasi politik dan hasil penelitian, peneliti akan menjelaskan rentetan pandangan terhadap independensi jurnalis partisan media online di Kota Surabaya dalam pemberitaan.

Pertama independensi dalam menyampaikan berita, di mana status kedua jurnalis rangkap profesi dan memobilisasi pemberitaan visi misi, agenda, dan pencitraan partai politik yang merekrut mereka secara tidak proporsional, telah mencoreng independensi pemberitaan jurnalis. Kedua independensi dalam mencari berita, jurnalis idealnya bebas menggali berbagai informasi politik demi melayani masyarakat, kini justru membatasi aksesnya berkomunikasi dengan sumber berita di partai politik lain lantarangaya partisipasi politik terbuka yang mereka ambil. Ketiga independensi setelah menyampaikan berita, jurnalis sebagai komunikator politik dan saluran komunikasi online yang mereka gunakan, tidak menutup kemungkinan bahwa dengan sikap kepentingan politik praktisnya mampu membangun opini publik semakin kritis dalam menyikapi berita-berita politik yang sekadar bersifat pencitraan.

[110]Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab pertama maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Motif jurnalis politik media online di Kota Surabaya bergabung dengan partai politik yakni atas dasar pertimbangan rasional. Bahwa baik jurnalis Tri Wahyudi dan Rofik Hardian telah menilai secara objektif keputusannya dengan penuh kesadaran bahwa mereka memiliki tujuan maju menjadi calon anggota legislatif dari masing-masing parpol yang menaungi mereka. Meski independensi setiap jurnalis telah diatur dalam UU Nomor 40 tentang Pers pasal 1, serta dibekali KEJ dalam melakukan tugas jurnalistik untuk bersikap berimbang dan tidak beropini pribadi, kenyatannya hal tersebut tidak memengaruhi niat awal mereka meski harus melanggar kemurnian independensi kewartawanan mereka sendiri.
2. Selanjutnya melalui pandangan PWI, Ketua Pokja jurnalis politik Surabaya, dan jurnalis politik independen media online, peneliti menemukan tiga rentetan independensi jurnalis partisan dalam pemberitaan:
   a. Independensi dalam menyampaikan berita.
   b. Independensi dalam mencari berita.
   c. Independensi setelah menyampaikan berita.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan oleh penulis di atas, maka penulis perlu memberi saran-saran:

1. Pertama, jurnalis yang bergabung dengan partai politik disarankan untuk tidak menggunakan profesinya demi kepentingan karir pribadi, dan menghormati KEJ yang telah disahkan oleh Dewan pers.
2. Pemimpin Perusahaan media massa, dalam hal ini redaktur, seharusnya perlu lebih mengontrol jurnalis yang ditugaskan di lapangan agar tetap berpegang teguh pada nilai profesionalisme.
3. Peneliti merasa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari penyajian maupun pembahasan. Maka saran-saran akan sangat penting demi perkembangan keilmuan komunikasi dan politik yang akan datang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Hamad Ibnu. 2014. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa.* Jakarta*:* Yayasan Obor Indonesia.

Yunus Syarifudin. 2010 *Jurnalistik Terapan.* Ciawi – Bogor: Ghalia Indonesia.

Kusumaningrat, *Jurnalistik: Teori Dan Praktik*, 2005. Yogyakarta: CV. Andi Offset

Muhadjir Noeng, 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarsin

Partanto A Pius, M. Dahlan Al-Barry. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola

Rakhmat, Jalaluddin. 2005. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Liliweri, Alo. 1991. *Komunikasi Antar Pribadi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Adam, Reiner. 2000. *Politik dan Radio.* Yogyakarta: PT. Sembrani Aksara

Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.

Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo Mediasarana.

Rusadi, Kantaprawira. 1983. *Sistem Politik di Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.

Alfian. 1990. *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia.

McQuail, Denis. 2003. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Erlangga.

J.Schamandt, Henry. 2009. *Filsafat Politik: Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Kuswarno, Engkus. 2009. *Teori Fenomenologi*, Bandung: Widya Padjadjaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Djefrie, Yeremenia Manafie. 2010. *Teori Fenomenologi Sosial Modern,* Jakarta: Salemba Humanika.

Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu

Uchjana, Onong Effendy. 2003. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Arikunto, Suharsini. 1992. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Burhan Bungin, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id